

LAPORAN KINERJA INTERIM

BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON
TRIWULAN II 2026



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Laporan Interim Triwulan II Tahun 2026 dapat diselesaikan. Laporan Interim Triwulan II Tahun 2026 merupakan bentuk aktualisasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai POM di Ambon ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik mengenai kinerja untuk mendorong menyelenggarakan tugas umum dan fungsi selaku instansi pemerintah yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Interim Triwulan II Tahun 2026, diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan / tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja Balai POM di Ambon untuk meningkatkan kinerja pada Tahun berikutnya.

Ambon, 17 Juli 2026
Kepala Balai POM di Ambon,

\$(ttd_pengirim)

Tamran Ismail, S.Si., S.Farm., MP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, yang terdiri dari 27 Indikator Kinerja Utama. Pencapaian sasaran kegiatan Laporan Interim Triwulan I Tahun 2026 diukur dari 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (Enam) Direktif penugasan. Pada Triwulan II Tahun 2026, diperoleh nilai NKO sebesar 102,41% dengan kriteria **“Istimewa”**. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Ambon telah mencapai target 3 sasaran kegiatan dengan kriteria **“Sangat Baik”**, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria **“Baik”**, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**, dan 2 sasaran kegiatan dengan kriteria **“Indeks tahunan”**.

1. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran kegiatan **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”** sebesar 102,61% dengan kriteria **“Sangat Baik”**. Terdiri dari 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
 - **“Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 99,58, Target 97,77 dengan capaian 101,85% (**Sangat Baik**)
 - **“Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO”**, merupakan (**Indeks Tahunan**)
 - **“Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 99,79, target 97,70 dengan capaian 102,14% (**Sangat Baik**)
 - **“Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT”**, realisasi 0 target 100 dengan capaian 0% (**Dikecualikan dari penilaian**)
 - **“Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 100, target 92, dengan capaian 108,70% (**Sangat Baik**)

- **“Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”**, realisasi 95,19, target 92,99, dengan capaian 102,37% **(Sangat Baik)**
 - **“Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 100,00, target 98,00, dengan capaian 102,04% **(Sangat Baik)**
 - **“Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 88,89, target 88,57, dengan capaian 100,36% **(Sangat Baik)**
 - **“Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 99,85, target 99,50, dengan capaian 100,35% **(Sangat Baik)**
 - **“Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 98,43, target 95,10, dengan capaian 103,50% **(Sangat Baik)**
 - **“Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan”**, realisasi 94,68, target 97,63 dengan capaian 96,98% **(Baik)**
 - **“Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar”**, realisasi 100, target 92, dengan capaian 108,70% **(Sangat Baik)**
 - **“Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT”**, merupakan **(Indeks Tahunan)**
 - **“Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman”**, merupakan **(Indeks Tahunan)**
 - **“Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”**, realisasi 76,10, target 74,80, dengan capaian 101,74% **(Sangat Baik)**
2. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 101,05% dengan kriteria **“Sangat Baik”**. Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana 4 IKK dengan kriteria sebagai berikut :

- **“Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, realisasi 95,24, target 91,40, dengan capaian 104,20% **(Sangat Baik)**
 - **“Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”**, realisasi 70, target 70, dengan capaian 100,00% **(Baik)**
 - **“Jumlah Desa Pangan Aman”**, realisasi 70, target 70, dengan capaian 100,00% **(Baik)**
 - **“Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”**, realisasi 70, target 70 dengan capaian 100,00% **(Baik)**
3. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”** mencapai NPS sebesar 100,40% dengan kriteria **“Sangat Baik”**. Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
- **“Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan”**, realisasi 70,28, target 70, dengan capaian 100,40% **(Sangat Baik)**
4. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 181,82% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**. Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan kriteria sebagai berikut :
- **“Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”**, realisasi 100 dengan target 55 sehingga capaian 181,82% **(Tidak dapat disimpulkan)**
5. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 100% dengan kriteria **“Baik”**. Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana 1 IKK “ dengan kriteria sebagai berikut :

- **“Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”**, realisasi 50, target 50, dengan capaian 100,00% **(Baik)**
- 6. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Layanan Publik UPT yang prima”** yang merupakan indeks tahunan. terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
 - **“Indeks Pelayanan Publik UPT”**, dengan kriteria **(Indeks Tahunan)**
- 7. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal”** yang merupakan indeks tahunan Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
 - **“Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM”**, dengan kriteria **(Indeks Tahunan)**
 - **“Nilai AKIP UPT”**, dengan kriteria **(Indeks Tahunan)**
 - **“Nilai Kinerja Anggaran UPT”**, dengan kriteria **(Indeks Tahunan)**
 - **“Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM”**, dengan kriteria **(Indeks Tahunan)**

BPOM di Ambon akan terus melaksanakan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan BPOM di Ambon sehingga dapat mendukung kinerja BPOM di Ambon secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala dilakukan oleh BPOM di Ambon.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

Ambon, 17 Juli 2026
Kepala Balai POM di Ambon,

\$_{ttd_pengirim}\$

Tamran Ismail, S.Si., S.Farm., MP

HIGHLIGHT

Sebagai upaya mewujudkan visi "BPOM Menuju *World Class Bureaucracy*" pada *Road Map* Agen Perubahan Tahun 2026, Balai POM di Ambon telah merancang berbagai inovasi yang terintegrasi dalam *Project Action Plan*. Digitalisasi menjadi landasan utama, yang diimplementasikan melalui serangkaian program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas. Adapun inovasi yang digunakan selama Tahun 2026 pada Balai POM di Ambon adalah :

1. RB on Stage

Inovasi berupa kompetisi olahraga maupun seni yang bertujuan untuk meningkatkan engagement pegawai BPOM di Ambon melalui *team building* untuk menumbuhkan kerjasama dan kekompakan, meningkatkan kemampuan *leadership* dan mengasah kreativitas. RB On Stage mampu menciptakan momentum yang kuat untuk menggalang kesadaran akan pentingnya integritas berdasarkan *Core Values* ASN BerAKHLAK.



Gambar 2. Inovasi *RB on Stage*

2. Sosis RB (Sosialisasi Reformasi Birokrasi)

Inovasi berupa sosialisasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengedukasi dan menginternalisasi pegawai Balai POM di Ambon terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta *Core Values* ASN BerAKHLAK. Inovasi ini dilaksanakan setiap hari

Senin saat apel pagi dan kuis yang dilaksanakan setiap triwulan sebagai salah satu evaluasi keberhasilan inovasi ini.



Gambar 3. Inovasi Sosis RB

3. Sagu Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu, Sharing Pengalaman dan Pengetahuan)

Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan BPOM di Ambon dalam rangka pemenuhan informasi publik. Inovasi ini hadir melalui platform sosial media Balai POM di Ambon seperti Channel Youtube, Facebook dan Instagram serta buletin Mag Manise pada Panorama 24.



Gambar 4. Inovasi Sagu Salempeng

4. Kalesang BMN

Kalesang BMN merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Balai POM di Ambon guna mengefektifkan pemeliharaan BMN serta pelaporan yang dilakukan oleh pegawai/ pengguna BMN. Pada tahap awal pegawai akan diberikan

5 pilihan fitur yaitu konsultasi, input laporan, monitoring status penanganan laporan, permintaan layanan TI dan FAQ (*Frequently Asked Question*).



Gambar 5. Kalesang BMN

5. Panorama 24 (Papan Informasi Online 24 Jam)

Panorama 24 merupakan salah satu inovasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan publik dengan memberikan informasi terkait obat dan makanan yang dapat diakses secara online dengan mudah dan cepat berbasis web. Berbagai informasi yang dapat dilihat melalui menu profil, layanan, pengaduan dan konsultasi, informasi publik, inovasi dan kabar terkini seputar lingkup pengawasan Balai POM di Ambon melalui url: www.ambon.pom.go.id



Gambar 6. Inovasi Panorama 24

6. **BETAKEPO (Bersama Kita Kembangkan Potensi)**

Beta Kepo merupakan pelatihan/seminar/workshop yang bertujuan mendukung kompetensi pegawai Balai POM di Ambon untuk menunjang kinerja pegawai diluar kinerja utama.



Gambar 7. Inovasi Beta Kepo

7. **Kompas (KOMPetisi InovASi)**

Kompas adalah inovasi sebagai sarana kompetisi antar pegawai Balai POM di Ambon terkait ide dan improvement yang dilakukan di masing-masing fungsi maupun tingkat organisasi Balai POM di Ambon dengan kriteria/aspek penilaian antara lain masalah/isu, manfaat, dampak, keberlangsungan inovasi dan indikator keberhasilan. Output dari inovasi ini menjadi salah satu komponen penilaian inovasi PEGAWAI MANISE



Gambar 8. Inovasi KOMPAS

8. **Bacarita Do (Balai POM di Ambon Mudah Cari Data dan Dokumen di Subsite Balai POM di Ambon)**

Bacarita Do merupakan salah satu cara penyimpanan data dan dokumen agar mudah telusur dan aman. Pemanfaatan data dan dokumen Bacarita Do dapat

dengan mudah diakses oleh stakeholder internal maupun eksternal Balai POM di Ambon sebagai wujud keterbukaan publik terhadap pelayanan Balai POM di Ambon.



Gambar 9. Inovasi Bacarita Do

9. Pegawai Manise

Pegawai Manise merupakan sebuah inovasi yang dibentuk oleh Balai POM di Ambon dalam rangka pemberian apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan beberapa kriteria diantaranya kinerja (SKP), penghargaan/apresiasi, hasil survey pegawai dan Flexi Paskali.



Gambar 10. Inovasi Pegawai Manise

10. Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi)

Pin TOKI merupakan inovasi terkait gratifikasi berupa pin yang menjadi atribut wajib setiap pegawai Balai POM di Ambon baik yang berada di kantor (sebagai bentuk internalisasi) maupun bertugas di lapangan sebagai bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Selain itu, Pin TOKI juga diberikan kepada pengguna layanan publik/customer yang berkunjung ke Balai POM di Ambon sebagai bentuk sosialisasi terhadap sikap anti gratifikasi.



Gambar 11. Logo Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi).

11. MASKOT TOKI (Maskot Tolak Gratifikasi)

Maskot TOKI merupakan maskot yang dibagikan kepada stakeholder terkait sebagai bukti komitmen Balai POM di Ambon terhadap penolakan Gratifikasi.



Gambar 12. Inovasi Maskot TOKI

12. Lapor Katong

Sebagai inovasi layanan pengaduan (*Whistleblowing System*) eksternal dan internal yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan pegawai yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai prosedur melalui QR Code. Pelaporan yang bersumber dari pihak eksternal (masyarakat) akan langsung diarahkan ke WA

pengaduan yang dipegang oleh Kepala Balai POM di Ambon, dan pelaporan yang bersumber dari pihak internal akan tersambung langsung ke aplikasi Sang Integritas.



Gambar 13. Inovasi Laporan Katong

13. KUKIS (Keku Risiko)

Kukis merupakan saluran pelaporan risiko secara *online* yang ditujukan bagi seluruh pegawai BPOM Ambon. Inovasi ini selalu terbuka bagi seluruh pegawai Balai POM di Ambon untuk mengidentifikasi dan melaporkan adanya potensi risiko yang ditemui dalam kegiatan kerja sehari-hari.



Gambar 14. Inovasi KUKIS

14. Pusaka OMA (Percepatan Pengujian Sampel Eksternal Obat dan Makanan)

Pusaka Oma merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan publik Balai POM di Ambon sebagai wujud komitmen untuk memberikan layanan publik terbaik melalui percepatan pengujian sampel eksternal Obat dan Makanan yang cepat, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon.



Gambar 15. Inovasi Pusaka OMA

15. Gebrak Stunting (Gerakan Bersama Kurangi Stunting)

Gebrak Stunting merupakan kegiatan inovasi pelayanan publik Balai POM di Ambon bersama beberapa kolaborator dalam upaya penurunan angka stunting di Provinsi Maluku guna mencapai Indonesia emas 2045. Intervensi dalam program ini berupa pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal Maluku pada anak Gizi Kurang usia 1-4 tahun selama 1 tahun dengan intervensi wajib selama 90 hari (3 bulan) dan intervensi tambahan selama 9 bulan.



Gambar 16. Inovasi Gebrak Stunting

16. Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi Produk UMKM)

Pesta Kenari Pro UMKM merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan secara komprehensif kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk melalui pendampingan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui OSS RBA,

pendampingan pembuatan NPWP melalui pajak , percepatan proses pemeriksaan sarana balai, pendampingan proses e-sertifikasi, pendampingan proses e-registrasi, pendampingan akses permodalan, pendampingan SPP-IRT, pendampingan pembuatan desain label, membantu akses pemasaran, dan membantu akses sertifikasi halal.



Gambar 17. Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM

17. Toska

Toska merupakan inovasi yang dibuat agar para pelaksana perjalanan dinas dapat dengan mudah dan efektif melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa dokumen Rincian Biaya Perjalanan, Surat Pernyataan, Daftar Riil Pengeluaran, dan dokumen LS Perjalanan Dinas.



Gambar 18. Inovasi TOSKA

18. Mobil Terosa (Mobil Keliling Pelayanan Terpadu Obat dan Makanan bersama Kader)

Mobil Terosa merupakan inovasi yang melibatkan berbagai pihak yakni pemerintah dan masyarakat (kader) dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, memberikan informasi dan edukasi obat dan makanan aman kepada masyarakat dan melakukan sampling dan pengujian cepat pangan aman olahan siap saji.



Gambar 19. Inovasi Mobil Terosa

19. Pala Voor MBG (Pala Voor MBG adalah Pantau dan Kawal Bersama untuk MBG Aman)

Inovasi Pala Voor MBG (Pala Voor MBG adalah Pantau dan Kawal Bersama untuk MBG aman) merupakan inovasi yang diinisiasi oleh BPOM di Ambon dengan tujuan untuk melakukan mitigasi resiko untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meningkatkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kantor regional di Maluku dan stakeholders terkait di provinsi Maluku termasuk kabupaten/kota. Adapun sasaran inovasi ini yakni : Sarjana Penggerak Perubahan Indonesia (SPPI), Sarana produksi MBG / Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Penjamah makanan MBG (pengelola SPPG), dan Penerima manfaat MBG (guru dan pelajar). Intervensi yang dilakukan berupa sosialisasi, edukasi, konsultasi, pengawasan, dan pengujian.



Gambar 20. Inovasi Pala Voor MBG

21. Paman Baronda (Program Desa Pangan Aman Berlanjut dan Replikasi oleh Pemerintah Daerah/Desa)

Inovasi Paman Baronda merupakan Inovasi yang mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan pangan melalui pemberdayaan kader dan komunitas di desanya. Tujuan inovasi ini adalah perluasan cakupan desa yang melaksanakan Program Desa Pangan Aman di Maluku secara mandiri, menumbuhkan komitmen untuk melakukan replikasi / keberlanjutan program keamanan pangan desa secara mandiri, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.



Gambar 21. Inovasi Paman Baronda

BAB I PENDAHULUAN



Triwulan II 2026

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon (Balai POM di Ambon) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan seluruh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Provinsi Maluku aman, bermanfaat, dan bermutu. Balai POM di Ambon bertanggungjawab memastikan seluruh produk yang beredar di Maluku telah melalui evaluasi keamanan dan mutu untuk melindungi masyarakat Maluku dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko bagi kesehatan. Peran BPOM ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Ambon sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yang meliputi pengawasan atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan di wilayah Provinsi Maluku.

Tugas Pokok dan Fungsi Balai POM di Ambon ini sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (ASTA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada butir 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; dan pada butir 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Memasuki tahun kedua rencana strategis 2025-2029, Balai POM di Ambon sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Provinsi Maluku perlu meningkatkan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kolaborasi efektif untuk semakin memperkuat tugas dan fungsi dalam perlindungan masyarakat Maluku. Dengan kemitraan yang efektif dan terintegrasinya berbagai layanan diharapkan Balai POM di Ambon dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Maluku dalam memastikan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan II 2026, Balai POM di Ambon menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2026 untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan kinerja ini sebagai bahan untuk peningkatan kinerja serta perbaikan berkelanjutan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI



Gambar 22. Gedung Balai POM di Ambon

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 3 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Ambon merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas

teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan Balai POM di Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku meliputi 9 (sembilan) kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.

Tugas

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, Balai POM di Ambon mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

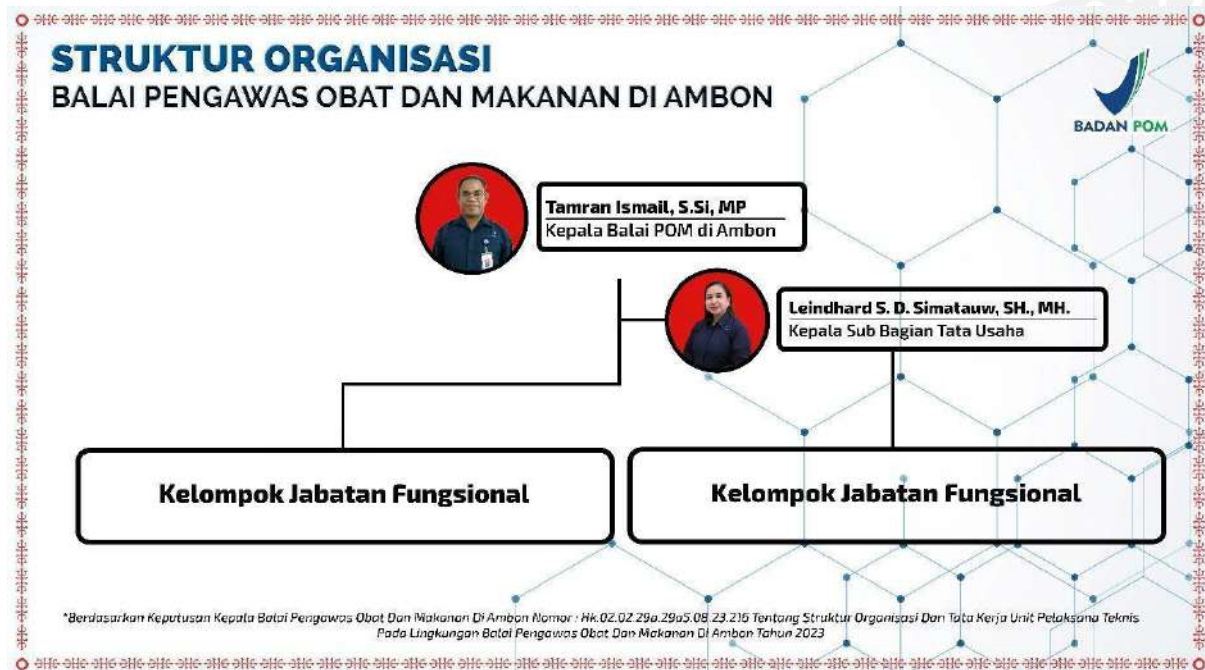
Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan

9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 23. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Tim Kerja dijabarkan sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan

rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

2. **Kelompok Jabatan Fungsional Pengujian** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Biomolekuler.
3. **Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
4. **Kelompok Jabatan Fungsional Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. **Kelompok Jabatan Fungsional Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai POM di Ambon memiliki peran sangat strategis dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu dan berkhasiat atau bergizi. Untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan perlu peran serta pelaku usaha sebagai produsen dan masyarakat selaku konsumen.

Balai POM di Ambon akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergisme dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai POM di Ambon untuk penjaminan keamanan obat dan makanan yang beredar.

Kolaborasi dan sinergisme Balai POM di Ambon pada Triwulan II Tahun 2026 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kawal Keamanan Pangan, Tim Gabungan BPOM dan Pemkab SBT Sidak Bahan Pangan Segar di Pasar Terminal Bula

Kegiatan pengawasan ini melibatkan petugas dari BPOM di Ambon, Dinas Kesehatan Kabupaten SBT, serta Dinas Perikanan Kabupaten SBT. Sidak dilakukan untuk memastikan bahan pangan segar yang banyak dikonsumsi masyarakat, khususnya ikan dan tahu, bebas dari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengambilan sampel terhadap 9 jenis produk pangan segar yang terdiri dari ikan segar dan tahu yang dijual oleh pedagang di Pasar Terminal Bula. Sampel yang diambil kemudian langsung diuji di lokasi menggunakan rapid test kit untuk mendeteksi kemungkinan adanya kandungan formalin. Melalui kegiatan pengawasan ini, BPOM di Ambon bersama Pemerintah Kabupaten SBT terus memperkuat sinergi dalam melindungi masyarakat dari potensi peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya. Selain melakukan pengujian, petugas juga memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai pentingnya menjaga kualitas dan keamanan pangan segar tanpa menggunakan bahan pengawet ilegal yang dapat membahayakan kesehatan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Berkomitmen Mengawal Program Keamanan Pangan

Program Intervensi Keamanan Pangan yang setiap tahun dilaksanakan oleh BPOM di Ambon, tahun ini memfokuskan kegiatannya di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan Pemberdayaan Keamanan Pangan yang menasar 3 aspek yakni Desa, Sekolah, dan Pasar diawali dengan Advokasi Terpadu antara BPOM Ambon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati SBB.

Peserta dalam kegiatan ini berasal dari pemerintah desa intervensi, kepala sekolah intervensi, kepala pasar intervensi, dan perwakilan dari OPD yang membawahi desa, sekolah dan pasar. Pemaparan materi dilakukan oleh Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail dan dilanjutkan pemaparan materi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada sesi diskusi yang berlangsung cukup hangat, diperoleh berbagai masukan dan harapan yang baik untuk program ini.



Gambar 24. Komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bag. Barat dalam keamanan pangan

3. Sinergitas BPOM di Ambon dan Lintas Sektor Adakan Vaksinasi HPV Jangkau 424 Peserta di Kota Ambon

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan penyakit dengan menggelar kegiatan vaksinasi *Human Papillomavirus* (HPV) pada Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda dan berhasil menjangkau total 424 peserta, melalui kolaborasi dengan sejumlah instansi di Provinsi Maluku. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura (Unpatti) dan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Di Fakultas Kedokteran Unpatti, kegiatan merupakan hasil kerja sama antara BPOM di Ambon dan pihak

fakultas, dengan jumlah peserta mencapai 100 orang. Sementara itu, pelaksanaan di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku melibatkan BPOM di Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, serta Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku dengan jumlah peserta sebanyak 324 orang.

Kegiatan vaksinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di daerah, di antaranya Wakil Gubernur Provinsi Maluku Abdullah Vanath, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Maya B.R. Lewerissa, Kepala BPOM di Ambon Tamran Ismail, serta Kepala Tata Usaha BPOM di Ambon Leindhard S.D. Simatauw. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan penyakit yang disebabkan oleh infeksi HPV.



Gambar 25. Pelaksanaan vaksinasi HPV

4. *Job Fair and Expo* Dies Natalis Ke-63 Universitas Pattimura, BPOM di Ambon Hadirkan Layanan Terpadu Obat dan Makanan Melalui Inovasi Mobil Terosa

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon hadirkan layanan terpadu obat dan makanan pada kegiatan *Job Fair and Expo* dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis Ke-63 Universitas Pattimura di Lapangan Auditorium. Kegiatan ini

berlangsung selama 2 hari, Senin-Selasa (20-21/04/2026). Sebagai bentuk dukungan dan realisasi rencana aksi Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pattimura, BPOM di Ambon menghadirkan 4 layanan terpadu obat dan makanan melalui Inovasi Mobil Terosa bagi pengunjung dan Pelaku Usaha UMKM. Layanan tersebut meliputi layanan permintaan informasi dan pengaduan, layanan registrasi, layanan pemantauan, dan layanan pengujian sederhana menggunakan rapid tes kit. Pada kesempatan tersebut BPOM di Ambon juga melibatkan para kader Kata BPOM on The Spot (KaBOS) yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (3 kader), Fakultas Sains dan Teknologi (1 kader) untuk memberikan komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) terkait bahaya penyalahgunaan whip pink bagi kesehatan dan cegah resistensi antimikroba (AMR) dengan ABC+4T. KaBOS merupakan mahasiswa aktif yang telah dilatih sebelumnya untuk menjadi perpanjangan tangan BPOM untuk melakukan KIE, pemantauan, dan pengujian sederhana obat dan makanan.



Gambar 26. Job Fair and Expo Dies Natalis Ke-63 Universitas Pattimura

5. BPOM Ambon Mendorong Sekolah Untuk Melakukan Bentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah

BPOM Ambon senantiasa mendorong kepala sekolah dan segenap komunitas sekolah untuk membentuk tim keamanan pangan sekolah. Hal ini menjadi cikal bakal kemandirian sekolah dalam menjamin keamanan pangan di lingkungannya. Sebagai Langkah awal untuk sekolah, dilakukan edukasi terkait keamanan pangan jajanan sekolah dalam kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini merupakan kolaborasi program Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2026 dengan lokus di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Inovasi BPOM di Ambon yakni Sapa Repost (Sadar Pangan Jajanan Anak Sekolah dan Replikasi Keberlanjutan Sekolah/Madrasah Sehat).

Peserta pada kegiatan ini merupakan sekolah full intervensi dan sekolah cakupan perluasan serta sekolah intervensi inovasi. Sebanyak 66 peserta hadir yang terdiri dari kurang lebih 40 sekolah dan diwakili oleh kepala sekolah, guru serta siswa. Sekolah full intervensi tahun ini sebanyak 10 sekolah dan sekolah perluasan cakupan sebanyak 20 sekolah semuanya berasal dari Kabupaten SBB, sedangkan sekolah intervensi inovasi Sapa Repost tidak hanya di Kabupaten SBB, tetapi juga dari beberapa kabupaten.

Diharapkan agar dengan adanya kegiatan ini, sekolah perluasan dan sekolah intervensi inovasi Sapa Repost memiliki pengetahuan keamanan pangan yang memadai sehingga berkomitmen dalam membentuk tim keamanan pangan sekolah yang tentu saja akan menjadi salah satu benteng sekolah dalam menjamin keamanan produk jajanan yang beredar di lingkungan sekolah serta menjadikan komunitas sekolah menjadi agen keamanan pangan yang cerdas.



Gambar 27. kolaborasi program Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2026

6. BPOM di Ambon Beri Dukungan Delegasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam Persiapan *National Moot Court Competition* Tahun 2026

Balai POM di Ambon menerima audiensi dan diskusi bersama Delegasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura melalui UKM Peradilan Semu Pattimura *Moot Court Congresio* dalam rangka persiapan mengikuti *National Moot Court Competition* Piala Tjokorda Raka Dherana IX Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Pattimura Balai POM di Ambon pada Selasa, 12 April 2026 pukul 09.30–11.30 WIT.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala Balai POM di Ambon, Tamran Ismail beserta jajaran dan delegasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang di dampingi Dekan dan Ketua Program Studi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi sekaligus permohonan bimbingan terkait pengembangan kasus posisi dan penyusunan berkas perlombaan untuk menghadapi lomba sidang tingkat nasional tersebut.

Melalui audiensi dan diskusi ini, diharapkan delegasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura dapat lebih memahami substansi kasus yang diperlombakan serta

mampu menyusun argumentasi hukum secara tepat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan Balai POM di Ambon terhadap peningkatan kapasitas dan wawasan mahasiswa di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan.



Gambar 28. Dukungan Kepada Delegasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura

7. KIE *FARMAKOVIGILANS* : BPOM di Ambon bergandeng tangan Bersama Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Sarana pelayanan Kesehatan dalam mengawal keamanan obat dengan aktivitasis *Farmakovigilans* di Provinsi Maluku.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) *Farmakovigilans* bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan Provinsi Maluku. Kegiatan berlangsung secara *hybrid* pada Rabu 13 Mei 2026 pukul 08.30 WIT – selesai di Ruang Pattimura BPOM Ambon dan melalui aplikasi Zoom *Meeting*. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai pentingnya *farmakovigilans* sebagai upaya deteksi dini terhadap Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) guna menjamin keamanan penggunaan obat di masyarakat. *Farmakovigilans* merupakan ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, serta pencegahan efek samping atau masalah lain yang berhubungan dengan penggunaan obat. Sistem

ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM RI, Nova Emelda, serta Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail. Sebanyak 45 peserta yang terdiri atas penanggung jawab Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dari rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Maluku mengikuti kegiatan secara luring maupun daring. Melalui kegiatan KIE *Farmakovigilans* ini, BPOM Ambon berharap tenaga kesehatan dan tenaga medis di Provinsi Maluku semakin aktif melaporkan ESO dan KTD melalui aplikasi e-MESO guna mendukung sistem pengawasan obat yang lebih efektif dan melindungi keselamatan masyarakat.



Gambar 29. KIE Farmakovigilans BPOM di Ambon

8. Balai POM di Ambon Dorong Daya Saing UMKM melalui Penyerahan Izin Edar dan Groundbreaking Rumah Produksi di Desa Kawa

Balai POM di Ambon terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan kepatuhan terhadap aspek keamanan pangan serta penguatan sarana produksi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan berbagai dokumen legalitas

produk pangan, penandatanganan komitmen bersama Kolaborasi Produk UMKM Masuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peletakan batu pertama pembangunan Rumah Produksi UMKM Poklahsar Mekar di Desa Kawa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (21/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Desa Kawa tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Kepala Balai POM di Ambon, Kepala KPPG Ambon, Ketua Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Maluku-Maluku Utara, perwakilan Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat, Penjabat Raja Negeri Kawa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan 6 dokumen legalitas yang terdiri dari 3 SP-PIRT, 2 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), dan 1 Nomor Izin Edar (NIE) kepada pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu dan daya saing produk pangan lokal. SP-PIRT diserahkan kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Setia Jaya untuk produk gula merah, KUPS Na Ana Pupuy untuk produk virgin coconut oil (VCO), serta Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Bersama untuk produk kopi jahe. Rangkaian kegiatan ditutup dengan *groundbreaking* atau peletakan batu pertama pembangunan Rumah Produksi UMKM Poklahsar Mekar Desa Kawa. Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Ketua YBM PLN Maluku-Maluku Utara, perwakilan Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat, Kepala Balai POM di Ambon, Kepala KPPG Ambon, dan Penjabat Raja Negeri Kawa.



Gambar 30. *Groundbreaking* Rumah Produksi di Desa Kawa

9. Balai POM di Ambon Bersama UPTD KPH Seram Bagian Barat Sukseskan Gerakan Penanaman Sejuta Pohon di Desa Waesamu

Balai POM di Ambon bekerja sama dengan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Barat melaksanakan Gerakan Penanaman Sejuta Pohon di Desa Waesamu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (21/05/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui aksi nyata penghijauan. Kegiatan yang berlangsung di Kebun Bibit UPTD KPH Seram Bagian Barat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Seram Bagian Barat, Leverne A. Tuasuun dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi; Kepala Balai POM di Ambon, Tamran Ismail; Kepala UPTD KPH Seram Bagian Barat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Melalui kegiatan ini, Balai POM di Ambon dan UPTD KPH Seram Bagian Barat berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat budaya menanam pohon

sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 31. Gerakan Penanaman Sejuta Pohon di Desa Waesamu

10. Balai POM di Ambon Perkuat Sinergi Lintas Sektor Cegah Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu

Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Ambon memperkuat komitmen lintas sektor dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT yang diselenggarakan di Aula SMA Negeri 2 Ambon, Selasa (26/5/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Selamatkan Generasi Bangsa” tersebut melibatkan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi profesi, media, pelajar, dan mahasiswa sebagai upaya bersama melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi Maluku, Faradillah Atamimi. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat melalui penguatan edukasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor. Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan diawali

dengan penandatanganan komitmen pencegahan penyalahgunaan OOT oleh seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Penandatanganan tersebut menjadi simbol dukungan dan keseriusan berbagai pihak dalam mewujudkan lingkungan yang aman dari penyalahgunaan obat.

Melalui kegiatan ini, Balai POM di Ambon berharap terbangun kesadaran yang lebih luas mengenai bahaya penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan. Komitmen yang telah dibangun bersama diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan obat.



Gambar 32. Balai POM di Ambon Perkuat Sinergi Lintas Sektor Cegah Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu

11. Advokasi Lintas Sektor Gebrak Stunting 2026 : Perkuat Komitmen Bersama Tuk Turunkan Stunting di Provinsi Maluku

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon menggelar advokasi lintas sektor untuk pelaksanaan Inovasi Gebrak Stunting (Gerakan Bersama Kurangi Angka Stunting) Tahun 2026 di Aula Pattimura, Ambon, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi para pemangku

kepentingan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Maluku melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor.

Gebrak Stunting merupakan inovasi yang diinisiasi BPOM di Ambon sejak tahun 2023 sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penurunan stunting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Program ini mengintegrasikan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dalam kegiatan advokasi tersebut juga dilakukan penandatanganan *Implementation Agreement* (IA) antara BPOM di Ambon dan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait tahapan pelaksanaan program Gebrak Stunting. Tahapan program meliputi advokasi lintas sektor, intervensi sensitif berupa pelatihan kader dan pelatihan komunitas, serta intervensi spesifik melalui pemberian makanan tambahan (PMT) selama 90 hari.



Gambar 33. Advokasi Lintas Sektor Gebrak Stunting 2026

12. BPOM Ambon Ikut Mendukung Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) merupakan salah satu upaya untuk menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi pangan yang beredar di masyarakat. Kegiatan pengawasan dilakukan secara

berkesinambungan mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga pemasaran guna memastikan bahwa produk pangan segar asal tumbuhan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan mencakup pemeriksaan terhadap aspek higiene dan sanitasi, penggunaan sarana produksi yang sesuai, penanganan pascapanen, pelabelan produk, serta pemantauan kemungkinan adanya cemaran biologis, kimia, maupun fisik. Selain itu, dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami dan menerapkan praktik penanganan pangan yang baik sehingga produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Robert Pensa dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh PFM Ahli Muda BPOM Ambon, Siska Yanti dan Perwakilan dari Purnama Lab. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman dan kesepakatan bersama untuk pengawasan dan penjaminan mutu pangan segar di Provinsi Maluku.

BPOM Ambon ikut serta menunjukkan kontribusinya dengan menjadi tim penyusun draft Peraturan Gubernur tentang Keamanan Pangan, menjadi anggota dalam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, serta menyusun perjanjian kerja sama antara BPOM Ambon dan Pemerintah Daerah tentang pengujian laboratorium pangan di laboratorium terkreditasi. Dengan adanya sinergi bersama ini, diharapkan membawa Provinsi Maluku menjadi daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran dan praktek keamanan pangan yang baik.



Gambar 34. BPOM Ambon dalam Mendukung Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan

13. Wali Kota Ambon Dukung Inovasi Gebrak Stunting, Hadiri *Launching* dan *Kick Off* Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil KEK dan Balita Stunting di Puskesmas Rijali

Komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam mempercepat penurunan angka stunting kembali ditegaskan melalui dukungan terhadap peluncuran dan kick off Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) serta balita stunting dan wasting. Kegiatan yang berlangsung di Puskesmas Rijali, Kamis (18/6), menjadi langkah nyata memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kota Ambon.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, bersama sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon, Tamran Ismail, Kepala BSI KC Ambon, Fauzi Umar, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, akademisi, organisasi profesi, serta berbagai mitra yang selama ini berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Peluncuran program ini merupakan bagian dari inovasi Gebrak Stunting (Gerakan Bersama

Kurangi Stunting) yang diinisiasi BPOM di Ambon. Inovasi tersebut lahir dari kebutuhan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dimulai sejak tahap paling awal dalam siklus kehidupan manusia. Menurutnya, berbagai program yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Ambon telah difokuskan pada upaya pencegahan sejak masa pra nikah, kehamilan, persalinan, hingga masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Program Gebrak Stunting sendiri sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi profesi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail, menjelaskan bahwa inovasi Gebrak Stunting merupakan bentuk kontribusi nyata BPOM dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Melalui program ini, BPOM tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan keamanan pangan, tetapi juga terlibat aktif dalam edukasi dan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan beragam bagi masyarakat. Melalui pelaksanaan Program Gebrak Stunting, Pemerintah Kota Ambon optimistis upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi para penerima, tetapi juga menjadi investasi penting dalam mewujudkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.



Gambar 35. Launching dan Kick Off Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil KEK dan Balita Stunting di Puskesmas Rijali

14. Balai POM di Ambon Perkuat Kapasitas SDM Pengawasan Pangan untuk Wujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman di Maluku

Balai POM di Ambon bersama Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan sistem pangan yang aman melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pangan dalam rangka Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* pada Kamis (25/6/2026) ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan, kesehatan, pertanian, dan perikanan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menetapkan persentase kabupaten/kota pangan aman sebagai salah satu indikator pembangunan nasional dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai instansi pengampu.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi, yang menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem

pengawasan pangan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai peran, tugas, serta mekanisme pengawasan pada masing-masing kategori pangan sesuai kewenangan instansi terkait. Kesamaan persepsi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pengawasan pangan di wilayah masing-masing. Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman menjadi salah satu strategi BPOM dalam mendorong terbangunnya sistem pengawasan pangan yang berkelanjutan di daerah. Dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, diharapkan setiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku mampu menciptakan ekosistem pangan yang aman, bermutu, dan melindungi kesehatan masyarakat.



Gambar 36. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pangan dalam rangka Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2026

15. Sosialisasi dan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik di Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah

Sebagai tindak lanjut dari Hasil Pertemuan Advokasi Implementasi Inovasi Paman Baronda di Kantor Kecamatan Saparua Timur pada Jumat 20 September 2024 antara Kepala Balai POM di Ambon dengan Raja Raja di Kecamatan Saparua dan Saparua Timur, maka bertempat di Kantor Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah menyelenggarakan Sosialisasi kepada Kader Desa dan melakukan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT di Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku tanggal 29-30 Juni 2026 dengan narasumber dari Balai POM di Ambon. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di buka oleh Kepala Pemerintah Negeri Nolloth , Zeth .D. Patty. Dalam sambutannya beliau mengharapkan keseriusan dari Kader Desa & Pelaku Usaha Pangan untuk mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan sehingga dapat menambah pengetahuan sebagai kader Desa dan dapat memperoleh Sertifikat PKP yang merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi dalam mendapatkan SPP-IRT, selanjutnya beliau memberikan apresiasi kepada narasumber dari Balai POM di Ambon, Anita Soenarko yang berkesempatan hadir di Nolloth memberikan materi kepada Kader Desa dan Pelaku Usaha Pangan.

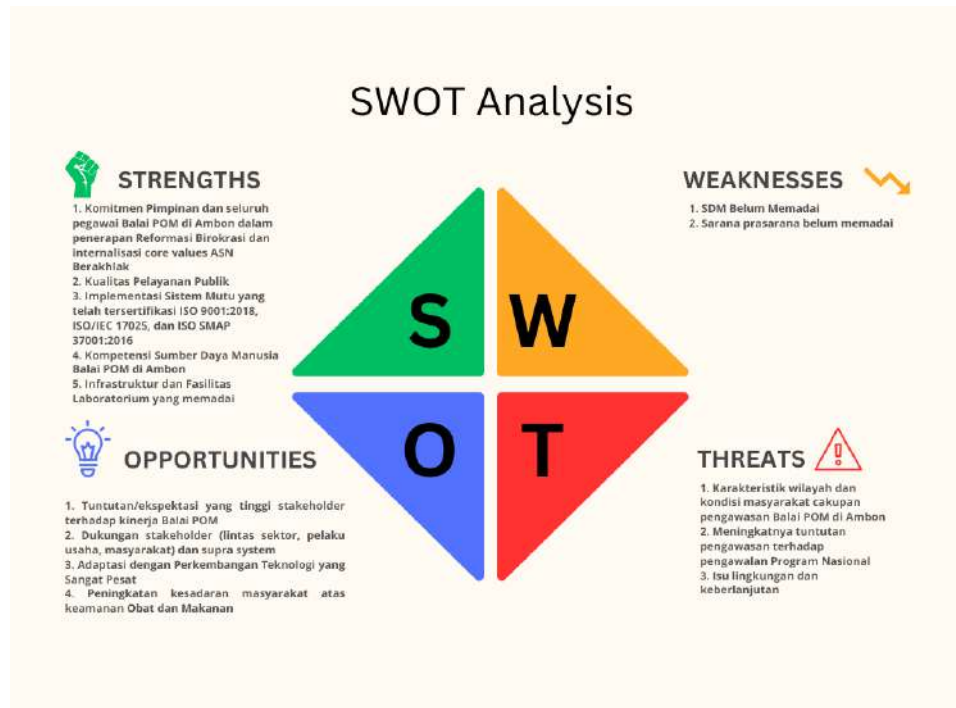
Balai POM di Ambon terus berupaya membangun sistem pengawasan pangan kepada Pelaku Usaha Pangan secara berkelanjutan, sehingga mereka semakin mandiri dalam memproduksi pangan dan turut mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.



Gambar 37. Sosialisasi dan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik di Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Ambon.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 38 berikut :



Gambar 38. Analisis SWOT Balai POM di Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga kepercayaan publik
2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan *full spectrum*

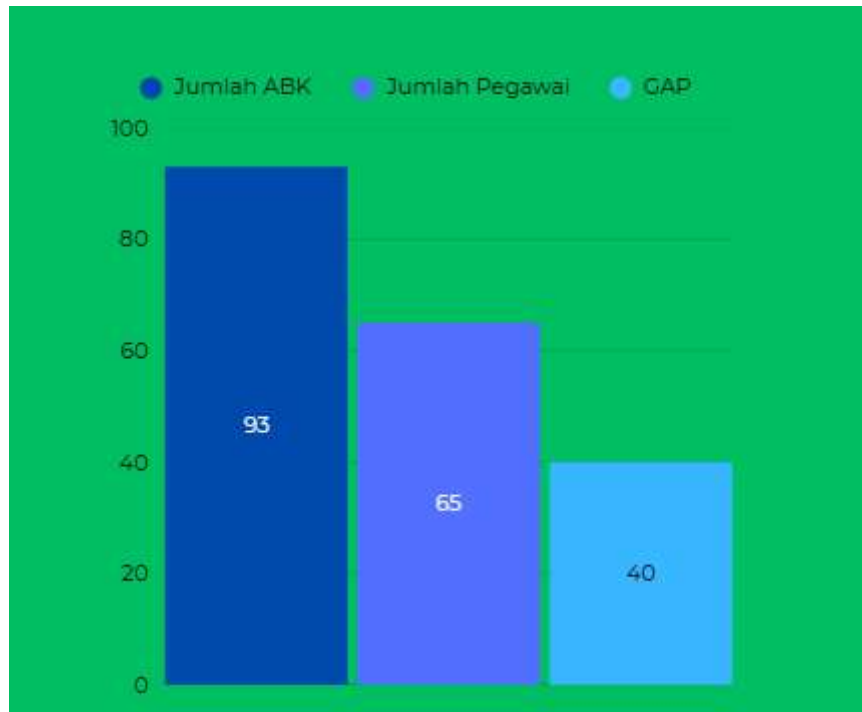
3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan
4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan publik
5. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk
6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal.

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

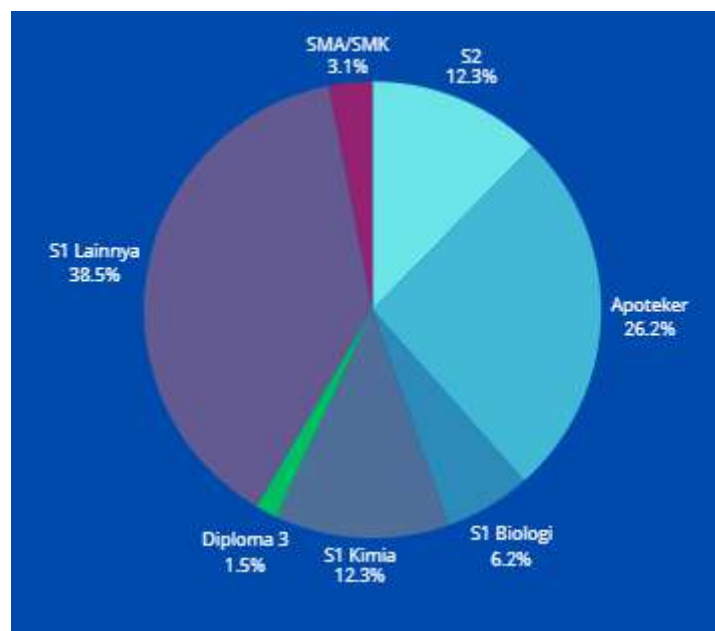
1.4.2.1 INTERNAL

1.4.2.1.1 Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2026-2030 untuk data cut off tanggal 1 November 2025, sedangkan jumlah SDM yang tersedia sampai 30 Juni 2026 berjumlah 65 (lima puluh lima) orang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian 54 (lima puluh dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 (sepuluh) orang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, serta terdapat 17 (tujuh belas) orang pegawai dari penyedia jasa Pihak Ketiga (outsourcing). Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 28 (Dua puluh delapan ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 40 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan (pengembangan karir pangkat/jabatan dan usulan CASN) = 43) diluar tenaga Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.



Gambar 39. Gap Jumlah Pegawai Terhadap ABK



Gambar 40. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan pada Balai POM di Ambon

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai POM di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi

fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat sampai dengan bulan Juni Tahun 2026 sebanyak 11 (sebelas) orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar sambil bekerja.

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4.2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Luas lahan Balai POM di Ambon seluas 4.450 m² dengan luas lantai Bangunan sebesar 3.172 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon. Laboratorium Balai POM di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan. Untuk

menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai POM di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Selain itu, Balai POM di Ambon dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen terintegrasi

1.4.2.1.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai POM di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2026 sebesar Rp14,640,686,000 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp8.273.698.389 (*Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 51,93%. Hingga triwulan II 2026, Terdapat 11 (Sebelas) kali dari DIPA awal Rp 16.377.853.000,00 menjadi Rp14.598.751.000,00 yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

1.4.2.2 EKSTERNAL

1.4.2.2.1 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan kepentingan gender dalam kebijakan dan program pembangunan guna menciptakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Kesalahpahaman umum di masyarakat sering menyamakan gender dengan jenis kelamin atau menganggapnya hanya terkait dengan perempuan. Padahal, isu gender mencakup ketimpangan yang berdampak pada akses, hak, peran, dan kesempatan bagi kedua belah pihak. Untuk mengatasi ketimpangan ini, PUG menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan akuntabel. Strategi ini telah dicanangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mewajibkan

setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengimplementasikan PUG sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sebagai upaya percepatan implementasi, pada tahun 2012 ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). BPOM turut berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dengan menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Keputusan Kepala BPOM tahun 2013 dan 2014 tentang pedoman serta pembentukan Kelompok Kerja PUG. Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diperkuat melalui kesepakatan bersama pada 2015. Pada 2022, BPOM menegaskan komitmen ini dalam arah kebijakan tahun 2023 yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender dalam pengawasan obat dan makanan, sehingga PUG menjadi bagian integral dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. BPOM Ambon berkomitmen mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek kegiatan dan pelayanan. Setiap kegiatan mencantumkan data jenis kelamin dan usia dalam daftar hadir untuk memastikan keterwakilan yang inklusif. Selain itu, fasilitas bagi kelompok rentan telah disediakan guna mendukung akses yang setara bagi seluruh peserta. Dalam komunikasi resmi, prinsip PUG juga diterapkan dengan mencantumkan aspek kesetaraan gender dalam surat-menyerat. Dukungan terhadap PUG semakin diperkuat melalui tagging anggaran pada rincian output tertentu untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terarah. Setiap bahan paparan dan spanduk kegiatan BPOM Ambon juga telah dilengkapi dengan logo PUG 'Setara Berdaya' sebagai simbol komitmen terhadap kesetaraan dan pemberdayaan gender. Dengan langkah-langkah ini, BPOM Ambon terus berupaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan semua.



Gambar 41. Setara Berdaya Badan POM

1.4.2.2.2 Stunting di Prov Maluku

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kurangnya stimulasi psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal, stunting juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, menghambat perkembangan kecerdasan, dan mempengaruhi potensi produktivitas di masa depan. Dari sisi ekonomi, stunting berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dengan target nasional prevalensi stunting turun menjadi 14,2% pada akhir tahun 2029.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Prevalensi stunting di Provinsi Maluku naik 2,3% dari Tahun 2022 yaitu 26,1% menjadi 28,4%. Terdapat 7 dari 11 Kabupaten/kota di Maluku mengalami kenaikan signifikan, yakni Kabupaten Kepulauan Aru naik dari 28,1% menjadi 40,6 %. Maluku Tenggara naik dari 26,8% menjadi 34 %. Kota Tual naik dari 24,9% menjadi 32%. Kabupaten Seram Bagian Barat naik menjadi 31,4% dari 27,5 %. Maluku Barat Daya naik dari 25,7% menjadi 29,9%. Kabupaten Maluku Tengah juga alami kenaikan signifikan yakni dari 27% naik menjadi 29,4%. Dan Kabupaten Seram Bagian Timur naik menjadi 27,5 % dari 24,1%. Sementara 4 Kabupaten/Kota lain, mengalami penurunan yakni, Kepulauan Tanimbar dari 31,5% menjadi 25,1%. Kabupaten Buru dari 23,3% menjadi 20,3%. Buru Selatan turun dari 41,6% menjadi 35,5% dan an Kota Ambon turun dari 21,1% menjadi 20,7%.

Badan POM menjadi salah satu institusi pemerintah yang diamanatkan oleh Perpres 72 tahun 2021 melakukan intervensi sensitif, maka Balai POM di Ambon berinisiasi mengembangkan inovasi GEBRAK STUNTING (Gerakan bersama Kurangi Stunting). Untuk keberhasilan Inovasi ini, maka diperlukan kerjasama

dengan berbagai pihak sehingga program percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku dapat direalisasikan baik melalui intervensi sensitif maupun spesifik. Dalam melaksanakan Inovasi Gebrak Stunting ini, Balai POM di Ambon mengadeng Organisasi Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga, Organisasi Profesi, Organisasi Kemanusiaan, dan Akademisi. Total ada 13 kolaborator yang berkomitmen bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan ini.



Gambar 42. Inovasi Gebrak Stunting BPOM Ambon

Pada triwulan II 2026, Telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung penanganan *stunting* di Prov Maluku, diantaranya:

- BPOM Ambon Tingkatkan Pengetahuan Komunitas Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Orang Tua Balita Stunting

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas Keamanan Pangan yang menyasar ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan orang tua balita stunting maupun wasting. Kegiatan yang merupakan bagian dari dukungan terhadap inovasi Gebrak Stunting 2026 tersebut digelar di Puskesmas Rijali, Kota Ambon, Rabu (17/6/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku.

Kepala BPOM di Ambon menyampaikan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat terkait keamanan pangan, gizi, dan pola asuh menjadi langkah penting dalam mencegah stunting sejak dini, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu

hamil KEK dan balita. Dalam kegiatan tersebut, Dosen Gizi Poltekkes Kemenkes Maluku, Nilfar Ruaida, memaparkan sejumlah strategi yang perlu diperkuat dalam penanganan stunting dan wasting. Menurutnya, pencegahan KEK dan anemia pada ibu hamil merupakan fondasi utama dalam melahirkan generasi yang sehat. Selain materi gizi dan pola asuh, BPOM di Ambon juga memberikan edukasi mengenai keamanan pangan kepada peserta. Materi ini dinilai penting karena pangan yang bergizi tinggi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak aman untuk dikonsumsi.

- Wali Kota Ambon Dukung Inovasi Gebrak Stunting, Hadiri Launching dan Kick Off Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil KEK dan Balita Stunting di Puskesmas Rijali

Komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam mempercepat penurunan angka stunting kembali ditegaskan melalui dukungan terhadap peluncuran dan kick off Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) serta balita stunting dan wasting. Kegiatan yang berlangsung di Puskesmas Rijali, Kamis (18/6), menjadi langkah nyata memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kota Ambon.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, bersama sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon, Tamran Ismail, Kepala BSI KC Ambon, Fauzi Umar, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, akademisi, organisasi profesi, serta berbagai mitra yang selama ini berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Program Gebrak Stunting sendiri sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi profesi, dunia usaha, hingga masyarakat.

1.4.2.2.3 Resistensi Antimikroba

Antimicrobial Resistance (AMR) adalah kondisi di mana mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, tidak lagi merespons pengobatan dengan obat-obatan antimikroba yang sebelumnya efektif. Ini berarti kuman-kuman tersebut menjadi kebal terhadap obat tersebut, sehingga infeksi yang disebabkan oleh mereka menjadi lebih sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, dan dapat meningkatkan keparahan penyakit atau bahkan kematian.

Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran penting dalam pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia melalui pengawasan peredaran dan penggunaan antimikroba, pemantauan dan evaluasi registrasi obat, penguatan kebijakan melalui pedoman, dan edukasi masyarakat. Badan POM juga aktif dalam gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba dan melakukan kajian serta surveilans terkait antimikroba.

Resistensi antimikroba di Prov Maluku sendiri adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian serius, terutama karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat. BPOM Ambon hadir untuk berupaya memperkuat sinergi penta helix untuk mengatasi AMR, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Pencegahan AMR dapat dilakukan dengan strategi ABC + 4T, yang mencakup pemahaman tentang AMR, bahayanya, cara mikroba menjadi resisten, serta pentingnya penggunaan antimikroba sesuai resep dokter dan tidak menghentikannya sebelum selesai. Pada Tahun 2024, Kota Ambon mendapatkan predikat sebagai Kota dengan penanganan dan kepatuhan terhadap pencegahan resistensi antimikroba, dan pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Maluku Hal ini menjadi trigger bagi kab/kota lainnya di Provinsi Maluku untuk melakukan hal serupa sehingga dapat dikatakan bahwa edukasi dan pengawasan BPOM di Ambon dalam pengendalian resistensi antimikroba cukup berhasil



Gambar 43. Sosialisasi pencegahan AMR melalui media social

1.4.2.2.4 Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km², yang terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² dan luas daratan 54.185 km², dengan kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan.



Gambar 44. Peta Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah penduduk 1.831.880 jiwa menurut proyeksi tahun 2020. Wilayah Kerja Balai POM di Ambon meliputi 9 kabupaten/kota:

- Kota Ambon
- Kota Tual

- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten. Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar. Pola transportasi yang digunakan ke semua kota/kabupaten di Provinsi Maluku adalah melalui transportasi darat, laut, dan udara.

1.4.2.2.5 Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 220 sarana dengan rincian sarana produksi sediaan farmasi (Sarana produksi OBA) 3, sarana produksi pangan olahan 9, sarana distribusi sediaan farmasi 119, dan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 89.

1.4.3 Pembahasan Isu Strategis Balai POM di Ambon

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Ambon baik internal maupun eksternal, antara lain:

1.4.3.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.4.3.2 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon sampai dengan bulan Juni Tahun 2026 sejumlah 65 (lima puluh lima) orang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian 54 (lima puluh dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 (sepuluh) orang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, serta terdapat 17 (tujuh belas) orang pegawai dari penyedia jasa Pihak Ketiga (outsourcing). Untuk pegawai PNS, terhitung sebanyak 40 (Empat puluh) orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan sisanya menjabat sebagai fungsional tertentu non-pengawas farmasi makanan, fungsional umum dan struktural sebanyak 7 (Tujuh) orang pegawai. Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks Balai POM di Ambon harus selalu melakukan peningkatan kompetensi SDM-nya. Selain itu, Balai POM di Ambon juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan pengembangan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang, berbudaya kerja yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2026-2030 untuk data *cut off* tanggal 1 November 2025. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 28 (Dua puluh delapan ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 40 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan (pengembangan karir pangkat/jabatan dan usulan CASN) = 43) diluar tenaga Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.

1.4.3.3 Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, informasi, etika kerja, dan lain-lain. Dalam bentuk bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Balai POM di Ambon telah memiliki gedung layanan publik yang memadai, di mana dilakukan pelayanan secara terpadu sesuai dengan standar pelayanan yang telah dimaklumkan oleh Balai POM di Ambon. Tidak hanya dari segi bangunan, tapi kompetensi petugas layanan public juga terus dikembangkan lewat berbagai pelatihan terpusat dan pelatihan mandiri.

Balai POM di Ambon telah meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan pembenahan ruang pelayanan publik. Pembenahan ini berpedoman dengan prinsip layanan publik yang transparan dan nyaman termasuk bagi konsumen penyandang disabilitas. Predikat “Pelayanan Prima” yang telah disandang oleh Balai POM di Ambon menjadi sebuah standar kualitas pelayanan yang terus memicu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kenyamanan dan kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan Balai POM di Ambon senantiasa menjadi prioritas utama. Fasilitas layanan untuk disabilitas juga telah memadai.

Fasilitas yang tersedia di gedung layanan publik sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI nomor 28 tahun 2022. Standar Pelayanan Publik BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah pedoman yang digunakan BPOM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu perorangan maupun pelaku usaha, terkait registrasi, perizinan, dan pengawasan obat dan makanan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, hingga penanganan pengaduan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Komponen Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

- Persyaratan: Dokumen dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan layanan.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pelayanan.
- Jangka Waktu Pelayanan: Batas waktu yang ditetapkan untuk setiap tahapan pelayanan.
- Biaya/Tarif: Biaya yang dikenakan untuk setiap jenis pelayanan.
- Produk Pelayanan: Hasil akhir dari proses pelayanan, misalnya izin edar, sertifikat, dll.
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Mekanisme untuk menanggapi keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan.

BPOM secara berkala melakukan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan untuk memastikan bahwa standar tersebut selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. BPOM juga melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, instansi terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat, dalam proses penyusunan dan perbaikan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik



Gambar 45. Ruang Pelayanan Terpadu Balai POM Ambon



Alat Bantu
disabilitas



Guiding Block
menuju loket



Guiding Block
menuju toilet



Wheelchair



Parkiran khusus
disabilitas



Alat bantu dengar
& Buku Braille



Loket Layanan
Prioritas



Toilet Disabilitas



Gambar 46. Fasilitas Disabilitas



Ruang Tunggu



Layanan oleh
Security



Tempat
penyimpanan helm
dan jaket



Bahan Bacaan



Charging station
dan welcome
drink



Informasi Layar
Sentuh



Mesin Antrian



Parkiran khusus
tamu



Tempat bermain
anak



Ruang Laktasi



Kulkas
penyimpanan ASI



Ruang Pengaduan



TV untuk edukasi

Gambar 47. Fasilitas pelayanan publik Balai POM di Ambon

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku.

1.4.3.3 Penguatan pengawasan obat dan makanan

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II TA. 2026 Pada BPOM di Ambon antara lain melalui penguatan Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) Inovasi Mobil Terosa yang dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota. Melalui inovasi ini diberikan 4 layanan yakni layanan informasi dan pengaduan; layanan pemantauan; layanan sertifikasi; dan layanan pengujian sederhana menggunakan rapid tes kit. Selama periode triwulan II 2026, layanan mobil terosa sebagai berikut:

- Layanan Informasi dan pengaduan: 6 Layanan
- Layanan Pemantauan: 109 Layanan
- Layanan Pengujian: 174 Layanan
- Layanan Sertifikasi: 0 Layanan

Layanan Inovasi Mobil Terosa ini bukan hanya mencakup lingkup Kota Ambon, tetapi juga di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan edukasi keamanan obat dan makanan.

1.4.3.4 Dukungan program kesehatan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

MBG paling umum dikenal sebagai singkatan dari Makan Bergizi Gratis, sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah, serta balita dan ibu hamil atau menyusui. Program MBG sendiri secara resmi dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2025 hingga sekarang dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan gizi pada anak sekolah, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Selain itu melalui program ini

diharapkan juga dapat berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) berperan penting dalam mendukung program ini melalui pengawasan mutu dan keamanan pangan, seperti pelatihan, sampling, pengujian produk, dan pengawasan rantai pasok. Pada Triwulan II Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon dalam menunjang keberhasilan program MBG di wilayah Maluku, diantaranya:

1. KIE Keamanan Pangan MBG di SMP N 37 Ureng Asilulu Kabupaten Maluku Tengah

Balai POM di Ambon bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ureng Asilulu melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Inovasi *Pala Voor* MBG (Pantau dan Kawal Bersama untuk MBG Aman), bertempat di aula yang merupakan gabungan dari dua kelas dari SMP N 37 Ureng Asilulu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Mei 2026. Hal ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait keamanan pangan serta cara pencegahan dan penanganan keracunan pangan dalam mengkonsumsi MBG, juga merupakan salah satu komitmen dalam mengawal MBG agar dapat menjamin pangan MBG yang dikonsumsi oleh penerima manfaat MBG. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SMP N 37 Asilulu dan dalam sambutannya, beliau mengapresiasi kegiatan ini mengingat MBG menjadi isu besar yang perlu dikawal terutama menyangkut kesehatan anak sekolah. Kepala Balai POM di Ambon Tamran Ismail dan Anita Soenarko selaku PFM Ahli Madya BPOM Ambon, memberikan materi terkait Keamanan Pangan MBG dengan judul Kenali Risiko Keracunan MBG, Kenali Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Ijin Edar dan Kedaluarsa) dan BPOM *Mobile* dalam menggunakan telepon selular, para generasi muda semakin cerdas dan efektif , materi diberikan kepada sejumlah 68 orang siswa yang diedukasi keamanan pangan. Tak lupa hadir Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dokter Rosita dan perwakilan

dari Pemda Provinsi Maluku dokter Fadila Atamimi turut memberikan motivasi kepada siswa SMP N 37 Ureng Asilulu agar tetap menjaga kesehatan.



Gambar 48. KIE Keamanan Pangan MBG di SMP N 37 Ureng Asilulu Kabupaten Maluku Tengah

2. KIE Keamanan Pangan MBG di SMA N 31 Ureng Asilulu Kabupaten Maluku Tengah

Balai POM di Ambon bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ureng Asilulu melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Inovasi Pala Voor MBG (Pantau dan Kawal Bersama untuk MBG Aman), bertempat di aula SMA N 31 Ureng Asilulu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Mei 2026 . Hal ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait keamanan pangan serta cara pencegahan dan penanganan keracunan pangan dalam mengkonsumsi MBG, juga merupakan salah satu komitmen dalam mengawal MBG agar dapat menjamin pangan MBG yang dikonsumsi oleh penerima manfaat MBG.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMA N 31 Asilulu , dalam sambutannya beliau mengapresiasi kegiatan ini

mengingat MBG menjadi isu besar yang perlu dikawal terutama menyangkut kesehatan anak sekolah.

Kepala Balai POM di Ambon Tamran Ismail dan Anita Soenarko selaku PFM Madya BPOM Ambon, memberikan materi terkait Keamanan Pangan MBG dengan judul Kenali Risiko Keracunan MBG, Kenali Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Ijin Edar dan Kedaluarsa) dan BPOM Mobile agar dalam menggunakan telepon selular, para generasi muda semakin cerdas dan efektif. Materi diberikan kepada sejumlah 47 orang siswa yang diedukasi keamanan pangan. Tak lupa hadir Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dokter Rosita dan perwakilan dari Pemda Provinsi Maluku dokter Fadila Atamimi turut memberikan motivasi kepada siswa SMA N 31 Ureng Asilulu agar tetap menjaga kesehatan.



Gambar 49. KIE Keamanan Pangan MBG di SMA N 31 Ureng Asilulu Kabupaten Maluku Tengah

1.4.3.5 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Balai POM di Ambon dan beberapa kampus di wilayah Provinsi Maluku, dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada civitas akademika mengenai keamanan obat dan makanan. Dalam periode Triwulan II Tahun 2026, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1. BPOM di Ambon Adakan Bimtek dan Penyuluhan Keamanan Pangan di Pasar Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat



Gambar 50. Bimtek dan Penyuluhan Keamanan Pangan di Pasar Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan penyuluhan keamanan pangan kepada komunitas Pasar Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (16/5/2026). Kegiatan ini merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2026, setelah sebelumnya dilakukan advokasi terpadu lintas sektor pada hari sebelumnya.

Bimtek dan penyuluhan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, serta kemandirian komunitas pasar terkait keamanan pangan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pangan yang beredar serta meningkatkan partisipasi komunitas dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di Pasar Luhu. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Selain itu, peserta juga dibekali materi terkait lima kunci keamanan pangan di pasar dan sarana peredaran, ciri-ciri pangan yang mengandung bahan berbahaya, pengenalan nomor izin edar (NIE), serta edukasi Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). Peserta juga diperkenalkan cara memeriksa legalitas produk melalui aplikasi BPOM Mobile dan fitur Cek-SPP-PIRT. Di akhir kegiatan, peserta diajak untuk

mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut guna memastikan keamanan obat dan makanan sebelum dikonsumsi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh serta turut mengedukasi pedagang lain di Pasar Luhu. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan keamanan pangan yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat sekitar.

2. Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa Piru Program Desa Pangan Aman



Gambar 51. Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa Piru Program Desa Pangan Aman

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon terus memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dan penyuluhan keamanan pangan di Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Desa Piru dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan kabupaten, sekaligus didukung potensi sumber daya alam darat dan laut yang melimpah. Kondisi ini menjadikan Desa Piru sebagai wilayah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan pangan lokal, namun juga memerlukan penguatan aspek keamanan dan mutu pangan.

Bimtek Kader Keamanan Pangan secara resmi dibuka oleh Kepala Desa Piru, Simon O. Manupassa, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas pangan yang aman dan layak konsumsi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPOM di Ambon, Anita Soenarko, yang memberikan materi komprehensif mencakup program desa pangan aman, prinsip dasar keamanan pangan, penerapan 5 kunci keamanan pangan sesuai rekomendasi World Health Organization, pencegahan stunting sebagai isu prioritas nasional, serta edukasi terkait resistensi antimikroba yang menjadi perhatian global dalam bidang kesehatan masyarakat.

Pendekatan edukatif yang digunakan dalam bimtek ini mengedepankan metode partisipatif sehingga kader tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengawasan pangan sederhana di tingkat rumah tangga, sekolah, dan pelaku usaha pangan lokal. Hal ini sejalan dengan berbagai hasil kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan perilaku higiene dan sanitasi pangan serta menurunkan risiko penyakit bawaan pangan (*foodborne diseases*).

BPOM di Ambon menegaskan bahwa penguatan keamanan pangan di tingkat desa merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam menjamin obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat di Desa Piru, diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan peningkatan ketahanan pangan lokal.

3. Balai POM di Ambon Tingkatkan Kemandirian Masyarakat melalui Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa di Seram Barat

Balai POM di Ambon melaksanakan Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa di Balai Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (20/5) ini diikuti oleh kader keamanan pangan desa, perangkat desa, serta komunitas masyarakat yang berperan dalam penerapan keamanan pangan di tingkat desa. Berbeda dari kegiatan edukasi pada umumnya, bimbingan teknis kali ini memberikan ruang yang lebih besar kepada Kader Keamanan Pangan Desa yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya untuk menjadi fasilitator sekaligus penyampai materi kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat agar pengetahuan dan praktik keamanan pangan dapat terus berkelanjutan di tingkat desa.

Sebanyak 20 komunitas keamanan pangan Desa Eti yang menjadi intervensi BPOM di Ambon dan 52 komunitas tambahan yang merupakan inisiatif desa mengikuti kegiatan tersebut sebagai implementasi inovasi Paman Baronda Balai POM di Ambon. Para kader menyampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan keamanan pangan, antara lain 5 Kunci Keamanan Pangan, Aplikasi Keamanan Pangan, Gizi Seimbang, Pencegahan Stunting, serta berbagai materi lain yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui konsumsi pangan yang aman dan bermutu. Melalui materi yang diberikan, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan pangan, memilih bahan pangan yang aman, mengolah pangan dengan benar, menerapkan pola konsumsi gizi seimbang, serta meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan stunting sejak dini. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan tidak hanya dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dalam kegiatan usaha pangan dan aktivitas masyarakat lainnya.

Melalui pemberdayaan kader dan komunitas keamanan pangan desa, Balai POM di Ambon terus berupaya membangun sistem pengawasan pangan

berbasis masyarakat yang berkelanjutan, sehingga masyarakat semakin mandiri dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya dan turut mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa.



Gambar 52. Balai POM di Ambon Tingkatkan Kemandirian Masyarakat melalui Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa di Seram Barat

1.4.3.6 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri obat dan makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Dalam salah satu studinya, the *World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif media sosial pada bermacam *platform*.

Dampak *e-commerce* menawarkan berbagai kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya ketersediaan tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat, menanggapi perkembangan teknologi yang bisa mengancam keamanan obat dan pangan aman.

Balai POM di Ambon mengadakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). BPOM di Ambon memastikan semua pegawai memahami pentingnya keamanan informasi dan tanggung jawab mereka terkait keamanan informasi.

1.4.3.7 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99%.

Sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menyasar pada UMKM. Balai POM di Ambon sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah melakukan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yaitu dengan adanya inovasi Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi).

1.4.3.8 Keadaan Wilayah Geografis Provinsi Maluku

Provinsi Maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90% adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 Kota.

Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan.

1.4.3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai upaya untuk implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, Badan POM telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus non fisik bantuan operasional Kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2026 pada 8 (Delapan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan untuk membiayai kegiatan operasional pengawas obat dan makanan yang menjadi

urusan daerah. Balai POM di Ambon berkomitmen mendukung pelaksanaan program DAK NF POM melalui :

- A. Memberikan pendampingan dan pengawalan implementasi kegiatan DAK NF POM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
- B. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian produk pangan
- C. Memberikan konsultasi pelaksanaan pengawasan sarana UMOT, dan sarana IRTP Pre dan Post Market
- D. Mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan KIE keamanan pangan
- E. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan tim pelaksana

BAB II PERENCANAAN



Triwulan II 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025 - 2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL). BPOM berupaya

menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan

produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, selaras dengan tujuan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Balai POM di Ambon dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa

semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan

dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI AMBON

Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Balai POM di Ambon 2025-2029

Strategi
1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Layanan Publik UPT yang prima
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Ambon tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Ambon Tahun 2026. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Ambon No. HK.02.02.6B.10.25.193 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2026.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW II
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,77	97,77
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,00	-
		Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	97,70	97,70
		Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00
		Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	92,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	92,99	92,99
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,00	98,00
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,57	88,57
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,50	99,50

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW II
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,10	95,10
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,63	97,63
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	22,22	-
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92,00	92,00
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00	-
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,80	74,80
2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	91,40	91,40
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	70,00
		Jumlah desa pangan aman	3	70,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70,00
3	Meningkatnya pendampingan UMKM	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	35,14	70,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW II
	dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		
4	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	77,50	55,00
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	50,00
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	-
7	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,26	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,00	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,10	-

Tabel 3. Direktif Penugasan Kepala UPT Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW II
1	Direktif Penugasan	Persentase Realisasi Belanja	86,00	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW II
		Produk Dalam Negeri		
		Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan	91,85	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	71,00	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	87,50	-
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota	96,00	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,50	-

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Ambon sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai POM di Ambon Triwulan I Tahun 2026 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 26 Februari 2026 dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp14,640,686,000,- (*Empat belas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). Balai POM di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2026

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,77
		2	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,00
		3	Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	97,70
		4	Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100,00
		5	Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	92,99
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,00
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,57

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,50
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,10
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,63
		12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	22,22
		13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92,00
		14	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00
		15	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,80
2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	91,40
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
		3	Jumlah desa pangan aman	3
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35,14
4	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	77,50
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00
6	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90
7	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan unit organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,26
		2	Nilai AKIP UPT BPOM	80,00
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,10
	Kegiatan :			
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Rp 5,189,696,000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Rp 9,450,990,000
	Total			Rp 14,640,686,000

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon selalu dimonitoring setiap Tahun untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap Tahun berikutnya

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2026

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Ambon Tahun 2026, maka dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2026 yang memuat target capaian secara Tahun yang disertai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Pada tanggal 19 Mei 2026, Balai POM di Ambon mengajukan revisi RAPK melalui nota dinas kepala Balai POM di Ambon nomor: PR.07.02.58B.05.26.247, Mengacu pada Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.07.2.03.26.204 tanggal 9 Maret 2026 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2026. Usulan perubahan RAPK Triwulan II 2026 dilakukan pada 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
- Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB

Terhadap usulan perubahan tersebut, telah mendapat persetujuan oleh Biro perencanaan dan keuangan nomor PR. 07. 21. 06. 26. 300 tanggal 09 Juni 2026, dan telah dilakukan penyesuaian pada RAPK Balai POM di Ambon. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2026 :

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2026

[illegible]

**LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2026**

[illegible]

[illegible]

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	10,620,000
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,9	35,624,000
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,26	2,370,402,500
		Nilai AKIP UPT BPOM												80	2,384,203,500
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,378,252,500
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,1	2,372,042,500
Total															14,640,686,000



2.5 Metode Pengukuran

Sejalan dengan berbagai regulasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi unit/satuan kerja dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	< 60	

Penetapan ini bertujuan untuk :

- Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
- Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Kriteria Penilaian Tahunan Capaian Kinerja

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai / Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% < x < 100\%$ ($70 \leq x < 100$)	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	

NKO Periodik

NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Hasil NKO dikelompokkan

menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 8. Tabel Penilaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap Tahun untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja ng dilakukan di Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan tim pelaporan dan Monitoring evaluasi di Balai POM di Ambon yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
2. Kepala Balai POM di Ambon menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Ambon;
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada database online <https://sites.google.com/view/kele-data-bpom-ambon> secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Balai;
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap Tahun pada aplikasi e-performance;
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Scorecard (BSC)*

serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 hingga eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik Tahunan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada Tahun berikutnya;

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.
7. Dalam pemantauan kinerja BPOM di Ambon menerapkan manajemen risiko dengan mengevaluasi respon yang diambil dalam penanganan terhadap hambatan/akar penyebab yang memungkinkan tidak tercapainya target kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Triwulan II 2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus IKK tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Untuk Indikator positif / polarisasi *maximize* (semakin **tinggi** realisasi, semakin **baik** kinerja), dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Ambon dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara tahunan. NKO tahunan dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut dan predikat AKIP. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Periodik Balai POM di Ambon Triwulan II Tahun 2026 sebesar 102,41% dengan kriteria “**Istimewa**”.

Tabel 9. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Ambon Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	97.77	99.58	101.85%	-	
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Juni	-	-	-	-	Indeks Tahunan
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	97.70	99.79	102.14%	-	
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Juni	100	0	0.00%	-	Dikecualikan dalam penilaian NKO
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	92	100	108.70%	-	
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	92.99	95.19	102.37%	-	
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	98	100	102.04%	-	
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	88.57	88.89	100.36%	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian		
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	99.5	99.85	100.35%	-	
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	95.1	98.43	103.50%	-	
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	97.63	94.68	96.98%	-	
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Juni	92	100	108.70%	-	
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Juni	-	-	-	-	Indeks Tahunan
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	74.8	76.1	101.74%	-	
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Juni	-	-	-	-	Indeks Tahunan
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Juni	91.4	95.24	104.20%	-	
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juni	70	70	100.00%	-	
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	Juni	70	70	100.00%	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian		
19	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni	70	70	100.00%	-	
20	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Juni	70	70.28	100.40%	-	
21	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Juni	55	100	181.82%	110,00%	
22	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Juni	50	50	100.00%	-	
23	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	-	-	-	-	Indeks Tahunan
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Juni	-	-	-	-	Indeks Tahunan
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai AKIP UPT	Juni	-	-	-	-	Indeks Tahunan
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Juni	-	-	-	-	Indeks Tahunan
27	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Juni	-	-	-	-	Indeks Tahunan
	Total Capaian PK						1915%	
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata – rata capaian PK)						102,41%	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian		
	Predikat NKO						ISTIMEWA	



3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 terdapat 7 sasaran kegiatan dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran Kegiatan	Kategori dan Notifikasi Warna
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102.61	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101.05	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.40	Sangat Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	181.82	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100	Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	Indeks Tahunan
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	Indeks Tahunan

Dari 7 sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat **3 sasaran kegiatan** dengan kategori “**sangat baik**”, **1 sasaran kegiatan** dengan kategori “**Baik**”, **1 sasaran kegiatan** dengan kategori “**Tidak dapat disimpulkan**”, dan **2 sasaran kegiatan** dengan kategori “**Indeks Tahunan**”. Sedangkan untuk pencapaian setiap indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW II Tahun 2026	Realisasi Kinerja					Ket
				Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian terhadap target TW II Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target TW II Tahun 2026	Capaian terhadap target Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2026	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.77	97.77	99.58	101.85%	Sangat Baik	101.85%	 Tercapai / Melampaui	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.70	97.70	99.79	102.14%	Sangat Baik	102.14%	 Tercapai / Melampaui	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	0	0.00%	Kurang	0	 Perlu Upaya Keras	Dikecualikan
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	100	108.70%	Sangat Baik	108.70%	 Tercapai / Melampaui	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	92.99	92.99	95.19	102.37%	Sangat Baik	102.37%	 Tercapai / Melampaui	

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW II Tahun 2026	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian terhadap target TW II Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target TW II Tahun 2026	Capaian terhadap target Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2026	Ket
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	100	102.04%	Sangat Baik	102.04%	 Tercapai / Melampaui	
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88.57	88.57	88.89	100.36%	Sangat Baik	100.36%	 Tercapai / Melampaui	
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99.5	99.5	99.85	100.35%	Sangat Baik	100.35%	 Tercapai / Melampaui	
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	95.1	95.1	98.43	103.50%	Sangat Baik	103.50%	 Tercapai / Melampaui	
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	97.63	97.63	94.68	96.98%	Baik	96.98%	 Akan Tercapai	
12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	22.22	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	92	100	108.70%	Sangat Baik	108.70%	 Tercapai / Melampaui	

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW II Tahun 2026	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian terhadap target TW II Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target TW II Tahun 2026	Capaian terhadap target Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2026	Ket
14	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
15	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.8	74.8	76.1	101.74%	Sangat Baik	96,57%	 Akan Tercapai	
16	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	91.4	91.4	95.24	104.20%	Sangat Baik	104.20%	 Tercapai / Melampaui	
17	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100	70	70	100.00%	Baik	70.00%	 Akan Tercapai	
18	Jumlah Desa Pangan Aman	100	70	70	100.00%	Baik	70.00%	 Akan Tercapai	
19	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	70	70	100.00%	Baik	70.00%	 Akan Tercapai	
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	35.14	70	70.28	100.40%	Sangat Baik	70,28	 Akan Tercapai	

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW II Tahun 2026	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW II Tahun 2026	Capaian terhadap target TW II Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target TW II Tahun 2026	Capaian terhadap target Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2026	Ket
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	77.5	55	100	181.82%	Tidak Dapat Disimpulkan	129,03	 Tercapai / Melampaui	
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	100	50	50	100.00%	Baik	50.00	 Perlu Upaya Keras	
23	Indeks Pelayanan Publik BPOM Ambon	4.9	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
24	Nilai Pembangunan ZI	87.26	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
26	Nilai Kinerja Anggaran	5	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
27	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	3.1	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	

Analisis akuntabilitas kinerja tiap indikator disajikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan I

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

IKSK 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sedangkan Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Dalam penentuan realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dihitung dengan menggunakan formula:

$$(A + B + C + D) / 4$$

Keterangan:

- A. Persentase Sampel **Obat** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= a+b+c+d+e
- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
 - b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
 - c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
 - d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
 - e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

B. Persentase Sampel **Obat Bahan Alam** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e) / 5$

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut.

C. Persentase Sampel **Suplemen Kesehatan** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e) / 5$

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut.

D. Persentase Sampel **Kosmetik** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
- d. Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 12. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW II Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2026 (%)	REALISASI TW II TA. 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.77	99.58	101.85%	 Sangat Baik

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, indikator "Persentase sampel sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" (Indikator 1) menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada triwulan ini, target yang ditetapkan adalah sebesar 97.77%. Dalam pelaksanaannya, BPOM di Ambon) berhasil mencatatkan realisasi kinerja yang melampaui target, yaitu sebesar 99.58%. Dengan hasil tersebut, persentase capaian kinerja untuk indikator ini menyentuh angka 101.85%. Berdasarkan standar penilaian yang berlaku, capaian ini menempatkan performa UPT pada kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW II)

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW II)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	97.77	100	102.28	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	97.77	99.58	101.85	 Sangat Baik

Realisasi capaian kinerja pada Indikator 1 menunjukkan adanya penurunan dari Triwulan I ke Triwulan II Tahun 2026:

- a. Angka realisasi menurun dari 100% pada Triwulan I menjadi 99.58% pada Triwulan II (turun sebesar 0,42%)
- b. Sejalan dengan hal tersebut, persentase capaian terhadap target juga mengalami penurunan dari 102.28% pada Triwulan I menjadi 101.85% pada Triwulan II (turun sebesar 0,43%).

Kinerja pemenuhan Sediaan Farmasi berisiko UPT dinilai mengalami penurunan namun masih mempertahankan performa target yang ditentukan selama dua triwulan berjalan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TA. 2026 (%)	REALISASI TW II TA. 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	97.77	99.58	101.85	 Tercapai / Melampaui

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan pada Indikator 1, status capaian menunjukkan kategori "Tercapai/Melampaui": Hingga Triwulan II TA. 2026, realisasi yang telah dikumpulkan mencapai 99.58% dari total target tahunan sebesar 97.77%. Dengan angka tersebut, progres pemenuhan target tahunan per pertengahan tahun ini sudah menyentuh 101.85%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II Tahun 2026 diperoleh capaian 101,85% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Pada Fungsi Pemeriksaan :

- Terdapat sampel OBA OK SK Kosmetik sebanyak 207 dari 207 item (100%) yang disampling pada TW II Tahun 2026
- Terdapat sampel OBA OK SK Kosmetik sebanyak 207 dari 207 item(100%) yang sesuai waktu pada TW II Tahun 2026
- Terdapat sampel OBA OK SK Kosmetik sebanyak 204 dari 207 item(100%) yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai evaluasi pusat pada TW II Tahun 2026, yaitu pada komoditi OBA pada bulan Mei sebanyak 2 item dan bulan Juni 1 item
- Terdapat sampel Obat sebanyak 113 dari 118 item (95,76%) yang disampling pada TW II Tahun 2026
- Terdapat sampel Obat sebanyak 113 dari 118 item (95,76%) yang disampling sesuai dengan renlak per kategori sampel pada TW II Tahun 2026
- Terdapat sampel Obat sebanyak 113 dari 118 item (95,76%) yang disampling sesuai dengan renlak per kelas terapi pada TW II Tahun 2026
- Terdapat sampel Obat sebanyak 113 dari 113 item (100%) yang dievaluasi penandaan pada TW II Tahun 2026
- Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) mempermudah pelaporan dan tindak lanjut.
- Kepatuhan terhadap rencana pelaksanaan sampling sediaan farmasi.
- Kompetensi petugas yang memadai dalam memahami regulasi dan kedisiplinan dalam pelaporan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan (Faktor Pendorong) yaitu:

- Tetap konsisten terhadap pedoman sampling dan monitoring timeline nya
- Petugas konsisten evaluasi penandaan, pengujian, dan pelaporan secara tepat waktu sesuai ketentuan pedoman sampling

IKSK 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase *fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* dapat dihitung dengan menggunakan **(A / B) x 100%**

A = Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B = jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 15. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO TW II Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i>	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Triwulan II 2026	-	-	-	Indeks Tahunan
------------------	---	---	---	----------------

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan data dalam pelaksanaan KTD/ESO, 3 dari 45 sarana (6,67 %) telah melaporkan KTD/ESO pada bulan Juni 2026. Adapun analisis penyebab keberhasilan pelaksanaan yaitu:

- Melakukan komunikasi aktif melalui WA grup BPOM di Ambon dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan.

- Koordinasi dan pendampingan sarana pelayanan kesehatan yang baik dalam pelaporan KTD/ESO.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Tidak ada Kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan (Faktor Pendorong) yaitu:

- Komunikasi aktif melalui WA grup Peserta KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan;
- Koordinasi dan pendampingan sarana pelayanan kesehatan yang baik dalam pelaporan KTD/ESO;
- Adanya pergantian penanggung jawab pelaporan e-MESO di sarana pelayanan kesehatan sehingga terdapat lebih dari 1 akun untuk 1 saryankes.

IKSK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Ambon. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Nilai capaian dari indikator ini dihitung dari serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Cara perhitungan :

$$\begin{aligned} &\text{\% sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} \\ &= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F \end{aligned}$$

Keterangan :

A : kesesuaian target sampel

B : kesesuaian parameter uji

C : ketepatan pengambilan kesimpulan

D : ketepatan waktu pengambilan sampel

E : ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

F : tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 18. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2026 (%)	REALISASI TW II TA. 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	97.70	99.79	102.14%	 Sangat Baik

Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari pelaksanaan kegiatan sampling, pemeriksaan, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, telah dilakukan sampling terhadap 146 item produk pangan olahan secara tepat waktu sesuai Rencana Pelaksanaan (Renlak), dan seluruh sampel telah diperiksa sesuai ketentuan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 sampel dilanjutkan ke tahap pengujian, sedangkan 1 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak memiliki izin edar (TIE) dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2026, sebanyak 140 sampel telah selesai diuji dan telah ditetapkan kesimpulannya sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian. Namun demikian, masih terdapat 1 sampel yang belum memenuhi kesesuaian parameter uji akibat keterbatasan anggaran pada balai penguji regionalisasi, serta 1 sampel yang penyelesaiannya melebihi target waktu karena kurang cermatnya proses rekapitulasi sampel dan tidak dilaksanakannya pengecekan ulang.

Berdasarkan hasil tersebut, realisasi indikator kinerja mencapai 99,79%. Dengan capaian tersebut, persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 102,14% terhadap target yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	97.70	99.86	102.21	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	97.70	99.79	102.14	 Sangat Baik

Realisasi persentase sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengalami sedikit penurunan, dari 99,86% pada Triwulan I Tahun 2026 menjadi 99,79% pada Triwulan II Tahun 2026. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya satu sampel yang belum memenuhi kesesuaian parameter uji serta satu sampel yang penyelesaiannya melebihi target waktu akibat kendala dalam proses rekapitulasi dan kurang optimalnya pengecekan ulang.

Meskipun demikian, realisasi indikator tersebut masih melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 97,70%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel pangan olahan berisiko telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, mulai dari proses sampling, pemeriksaan, pengujian, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Secara keseluruhan, kinerja Balai POM di Ambon pada indikator ini tetap menunjukkan hasil yang sangat baik, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan pangan olahan berisiko serta konsistensi dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.70	99.79	102.14	 Tercapai / Melampaui

Realisasi kinerja indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebesar 97,70%, indikator ini berhasil direalisasikan sebesar 99,79%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 102,14%. Berdasarkan hasil tersebut, kinerja indikator ini termasuk dalam kategori "Tercapai/Melampaui", yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

A. Keberhasilan capaian target kinerja pada triwulan II tahun 2026 disebabkan oleh :

- Kesesuaian target sampel. Sebanyak 146 dari 146 target sampel pangan olahan (100%) telah diperiksa sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian serta Rencana Pelaksanaan (Renlak).
- Kesesuaian parameter uji. Sebanyak 144 dari 145 sampel pangan olahan yang diterima laboratorium (99,31%) telah diuji menggunakan parameter yang sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.

- Ketepatan pengambilan keputusan. Sebanyak 140 dari 140 sampel pangan olahan (100%) yang telah selesai diperiksa dan diuji telah ditetapkan kesimpulannya sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian.
- Ketepatan waktu pelaksanaan sampling. Sebanyak 146 dari 146 target sampel pangan olahan (100%) telah diperiksa tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan (Renlak).
- Ketepatan waktu pelaporan. Sebanyak 139 dari 140 sampel pangan olahan (99,29%) yang telah selesai diperiksa dan diuji telah dilaporkan tepat waktu sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian.
- Tindak lanjut hasil pengawasan. Seluruh sampel pangan olahan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pada Triwulan II Tahun 2026, 1 dari 1 sampel TMS (100%) telah memperoleh tindak lanjut.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh tersedianya Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2026, SOP Makro dan SOP Mikro, pedoman tindak lanjut hasil pengujian, pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT), koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, meningkatnya kompetensi petugas, serta dukungan sumber daya laboratorium berupa personel yang kompeten, peralatan, reagensia, dan suku cadang yang memadai.

B. Penyebab Penurunan Kinerja

Meskipun target kinerja berhasil dilampaui, realisasi indikator mengalami sedikit penurunan dibandingkan Triwulan I Tahun 2026, yaitu dari 99,86% menjadi 99,79%. Penurunan tersebut disebabkan oleh masih terdapat satu sampel yang belum dapat diuji menggunakan seluruh parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian karena keterbatasan anggaran pada balai penguji regionalisasi. Selain itu, terdapat satu sampel yang penyelesaiannya

melebihi target waktu akibat kurang cermatnya proses rekapitulasi sampel dan belum optimalnya mekanisme pengecekan ulang sebelum pelaporan.

C. Upaya Perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Ambon akan:

- memperkuat koordinasi antara fungsi pemeriksaan dengan laboratorium regionalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengujian;
- meningkatkan monitoring terhadap penyelesaian pengujian dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengujian;
- menerapkan mekanisme verifikasi dan pengecekan ulang terhadap rekapitulasi sampel sebelum pelaporan;
- meningkatkan kompetensi petugas melalui pembinaan dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan Pedoman Sampling dan Pengujian; serta
- mengoptimalkan perencanaan kebutuhan anggaran pengujian agar seluruh parameter wajib dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
- memperkuat koordinasi dengan seluruh anggota regional Makassar dalam perencanaan sampling dan dukungan sumber daya untuk pengujian

D. Rekomendasi Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pada periode mendatang, perlu dilakukan penguatan pengendalian internal terhadap seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan sampling, pemeriksaan, pengujian, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan laboratorium regionalisasi, optimalisasi pemanfaatan SIPT sebagai alat monitoring, serta evaluasi berkala terhadap ketepatan waktu penyelesaian sampel dan kesesuaian parameter uji sehingga kualitas pengawasan pangan olahan dapat terus ditingkatkan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan (Faktor Pendorong) yaitu:

- Penyusunan dan evaluasi Rencana Pelaksanaan (Renlak) Sampling secara berkala melalui Rapat Evaluasi Sampling Bulanan
- Rapat koordinasi lintas UPT melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium
- Pengembangan kompetensi petugas pemeriksaan dan laboratorium
- Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT)
- Koordinasi rutin antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium secara berkelanjutan

IKSK 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan (KLB-KP) adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB-KP berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau

hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan (PODK) atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Definisi sampel KLB-KP diuji sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB-KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Pengujian sampel KLP-KB yang merupakan PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Regulasi terkait pengujian sampel KLB-KP :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 21. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT</i>	100	0	0	Dikecualikan dari penilaian NKO

Pada triwulan I tahun 2026, tidak terdapat kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan, sehingga indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT memiliki realisasi dan capaian NIHIL.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW II)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	100	0	0.00	 Kurang
Triwulan II 2026	100	0	0.00	 Kurang

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada Triwulan I dan II 2026 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap 0%. Hal ini terjadi karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, yaitu tidak terdapat kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan pada triwulan I dan II tahun 2026.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	 Perlu Upaya Keras

Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT memiliki realisasi dan capaian NIHIL pada triwulan I tahun 2026,

sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 0% dan dikategorikan dalam kriteria "Perlu Upaya Keras".

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tidak tercapainya realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, yaitu tidak terdapat kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan pada triwulan II tahun 2026.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada Kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan (Faktor Pendorong) yaitu:

- Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder secara intens untuk mengantisipasi terkait kejadian KLB keracunan pangan
- Karena tidak ada sampel KLB yang masuk ke laboratorium BPOM di Ambon, maka tidak dilakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja. Tim penanganan KLB keracunan pangan di lingkungan BPOM di Ambon sudah ditetapkan dan tim tersebut

beranggotakan dari tim infokom, pemeriksaan dan pengujian baik dari laboratorium kimia maupun mikrobiologi.

IKSK 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Ambon. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sedangkan Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Nilai capaian dari indikator ini dihitung dari serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Cara perhitungan :

$$\begin{aligned} &\text{\textit{\%sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}} \\ &= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F \end{aligned}$$

Keterangan :

A : kesesuaian target sampel

B : kesesuaian parameter uji

C : ketepatan pengambilan kesimpulan

D : ketepatan waktu pengambilan sampel

E : ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

F : tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 24. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2026 (%)	REALISASI TW II TA. 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	92	100	108.70%	 Sangat Baik

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari kegiatan sampling, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon. Sampai dengan triwulan II 2026, telah dilaksanakan sampling sebanyak 25 sampel PIRT secara tepat waktu sesuai rencana pelaksanaan (renlak) dan seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan, diuji dengan parameter wajib, ditetapkan kesimpulan dan dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling, serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan data tersebut, diperoleh realisasi kinerja sebesar 100%. Sehingga capaian persentase sampel PIRT yang memenuhi syarat pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 108.70% dengan kriteria “Sangat Baik”.

Pada pelaksanaan triwulan II, berdasarkan rekomendasi unit pengampu dan Biro perencanaan & keuangan terdapat penyesuaian format dan rumus pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) tingkat Unit pelaksana teknis. Perubahan rumus pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang disebutkan mengakibatkan perubahan data realisasi Balai POM di Ambon triwulan I (Januari – Maret). Oleh karena itu, Balai POM di Ambon telah melakukan penyesuaian data pada aplikasi Simetris *ePerformance*.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	92	100	108.70	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	92	100	108.70	 Sangat Baik

Realisasi indikator persentase sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil dipertahankan sebesar 108,70% pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan sampling dan pengujian sampel PIRT telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, Balai POM di Ambon mampu menjaga konsistensi dalam melaksanakan pengawasan terhadap keamanan PIRT.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108.70	 Tercapai / Melampaui

Realisasi kinerja indikator persentase sampel P-IRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebesar 92%, indikator ini berhasil direalisasikan

sebesar 100%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 108,70%. Dengan capaian tersebut, indikator ini termasuk dalam kategori "Tercapai/Melampaui"

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

A. Keberhasilan capaian target kinerja pada triwulan II tahun 2026 disebabkan oleh :

- Kesesuaian target sampel. Sebanyak 25 dari 25 target sampel P-IRT (100%) telah diperiksa sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian serta Rencana Pelaksanaan (Renlak).
- Kesesuaian parameter uji. Sebanyak 25 dari 25 sampel P-IRT yang diterima laboratorium (100%) telah diuji menggunakan parameter yang sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
- Ketepatan pengambilan keputusan. Sebanyak 25 dari 25 sampel P-IRT (100%) yang telah selesai diperiksa dan diuji telah ditetapkan kesimpulannya sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian.
- Ketepatan waktu pelaksanaan sampling. Sebanyak 25 dari 25 target sampel P-IRT (100%) telah diperiksa tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan (Renlak).
- Ketepatan waktu pelaporan. Sebanyak 25 dari 25 sampel P-IRT (100%) yang telah selesai diperiksa dan diuji telah dilaporkan tepat waktu sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian.
- Tindak lanjut hasil pengawasan. Seluruh sampel P-IRT yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pada Triwulan II Tahun 2026, 1 dari 1 sampel TMS (100%) telah memperoleh tindak lanjut.

Keberhasilan tersebut didukung oleh tersedianya Pedoman Sampling dan Pengujian, SOP Makro dan SOP Mikro, pedoman tindak lanjut hasil pengujian, pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT), koordinasi yang

baik antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten, peralatan, dan reagensia yang memadai sehingga seluruh tahapan pemeriksaan, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

B. Peningkatan/Pemeliharaan Kinerja

Realisasi indikator pada Triwulan II Tahun 2026 berhasil dipertahankan sebesar 100%, sama dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap P-IRT berisiko telah berjalan secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan sampling, pemeriksaan, pengujian, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Ambon akan terus memperkuat koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, mengoptimalkan pemanfaatan SIPT sebagai sarana monitoring pelaksanaan pengawasan, meningkatkan kompetensi petugas melalui pembinaan dan pelatihan, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjaga konsistensi pencapaian indikator kinerja.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang	Tidak ada Kendala	-	-	-	-	-	-

ditindaklanjuti sesuai ketentuan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu :

- A. Penyusunan dan evaluasi Rencana Pelaksanaan (Renlak) Sampling secara berkala melalui Rapat Evaluasi Sampling Bulanan
- B. Pengembangan kompetensi petugas pemeriksaan dan laboratorium
- C. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT)
- D. Koordinasi rutin antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium secara berkelanjutan

IKSK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);

- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 27. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2026 (%)	REALISASI TW II TA. 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	92.99	95.19	102.37%	 Sangat Baik

Capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan II TA. 2026 dikategorikan "Sangat Baik". Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 95,19%, yang mana angka ini telah melampaui target triwulanan sebesar 92,99% sehingga capaian sebesar 102,37%. Ini membuktikan bahwa stakeholder menindaklanjuti hasil pengawasan dengan sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	92.99	94.9	102.05	 Sangat Baik

Triwulan II 2026	92.99	95.19	102.37	 Sangat Baik
------------------	-------	-------	--------	--

Realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan tren positif dengan kenaikan sebesar 0,29% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026. Persentase tindak lanjut oleh stakeholder meningkat dari 94,9% menjadi 95,19%, yang mengindikasikan adanya peningkatan komitmen dan akselerasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di TW II ini. Persentase capaian naik dari 102.05% menjadi 102.37% dengan kenaikan sebesar 0,31%, secara keseluruhan kualitas implementasi keputusan pengawasan di lapangan tetap mengalami pertumbuhan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	92.99	95.19	102.37	 Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada Triwulan II TA. 2026 untuk indikator persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder telah melampaui target tahunan. Dengan realisasi sebesar 95,19%, angka ini telah melewati target yang ditetapkan untuk sepanjang tahun 2026, yaitu sebesar 92,99%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 102,37%. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha berjalan

sangat efektif sejak awal tahun, sehingga umpan balik atas hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat diselesaikan lebih cepat dari estimasi waktu yang direncanakan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, antara lain:

Pada Komoditi Obat:

- Sebanyak 74 dari 81 pelaku usaha telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan
- Terdapat 1 dari 1 (100%) lintas sektor telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan
- Adanya basis data Keputusan/rekomendasi pengawasan kepada stakeholder sehingga memudahkan pemantauan oleh petugas;
- Adanya regulasi yang mengikat (Peraturan BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan) yang mewajibkan pelaku usaha atau instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan;
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif antara BPOM dan stakeholder (pemerintah daerah, pelaku usaha, dan asosiasi);
- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi hasil pengawasan kepada stakeholder yang dilakukan secara intensif;
- Adanya sanksi administratif dan/atau pidana, sehingga meningkatkan komitmen dari pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

Komoditi OBA SK Kosmetik:

- Pelaksanaan pemeriksaan terhadap 16 sarana Obat Bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik menunjukkan capaian kinerja pengawasan yang baik, ditandai dengan 10 sarana memenuhi ketentuan serta 6 sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah berhasil ditindaklanjuti oleh pelaku usaha melalui pemusnahan produk dan penandatanganan surat pernyataan.
- Keberhasilan tindak lanjut atas seluruh temuan juga menunjukkan adanya sinergi yang baik antara petugas pengawas dan pelaku usaha dalam menjaga mutu dan keamanan produk yang beredar.
- untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, perlu dilakukan penguatan edukasi kepada pelaku usaha, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, peningkatan monitoring tindak lanjut, serta penguatan kapasitas petugas agar kualitas pengawasan semakin efektif dan tingkat kepatuhan sarana terus meningkat secara berkelanjutan.

Komoditi Pangan:

- Penetapan target sarana dilakukan berdasarkan analisa risiko dan pertimbangan peningkatan cakupan pengawasan dengan memfokuskan pada sarana baru
- Pelaksanaan monitoring secara berjenjang dan aktif dari ketua tim kepada petugas dan kepada pelaku usaha
- Pemberian sanksi tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha yang menuntut pelaksanaan sesuai dengan waktu yang ditentukan
- Sikap profesionalitas dari petugas kepada pelaku usaha

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu:

- Adanya basis data Keputusan/rekomendasi pengawasan kepada stakeholder sehingga memudahkan pemantauan oleh petugas;
- Adanya regulasi yang mengikat (Peraturan BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan) yang mewajibkan pelaku usaha atau instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan;
- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi hasil pengawasan kepada stakeholder yang dilakukan secara intensif;
- Adanya sanksi administratif dan/atau pidana, sehingga meningkatkan komitmen dari pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- Konsisten koordinasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan dan pelaku usaha) agar dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan pelaksanaan monev secara berkala

IKSK 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 30. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	100	102.04	 Sangat Baik

Capaian kinerja untuk indikator Persentase sarana produksi sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II TA. 2026 dikategorikan "Sangat Baik". Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 100%, yang mana angka ini telah melampaui target triwulanan sebesar 98% sehingga capaian sebesar 102,04%. Berdasarkan standar penilaian yang berlaku, capaian ini menempatkan performa UPT pada kriteria "Sangat Baik".

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	98	100	102.04	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	98	100	102.04	 Sangat Baik

Capaian indikator pada Triwulan II 2026 tetap/stabil dibandingkan Triwulan I 2026. Persentase realisasi tetap sebesar 100% dengan capaian kinerja 102,04%. Hal ini menunjukkan kinerja pengawasan sarana produksi sediaan farmasi tetap optimal dan target kinerja berhasil dipertahankan secara konsisten.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	100	102.04	 Tercapai / Melampaui

Target tahunan telah tercapai dan melampaui target. Realisasi Triwulan II Tahun 2026 mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 102,04%, sehingga termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi telah memenuhi seluruh target yang ditetapkan dan kinerjanya melebihi target tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Pemenuhan target pemeriksaan sarana terhadap target sarana yang diperiksa yang mencapai 100%
- Realisasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan telah sesuai dengan rencana / target pemeriksaan sarana yang ditetapkan;
- Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan timeline pelaporan yang ditetapkan;
- Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku;
- Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yang paling utama yaitu Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

IKSK 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 33. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW II Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.57	88.89	100.36	 Sangat Baik

Pada triwulan II tahun 2026 Realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 88,89 dengan capaian 100,36% kriteria "**Sangat baik**". Capaian diperoleh karena komitmen dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan yang telah di petakan. Hingga Triwulan II, Balai POM Ambon telah melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan sejumlah 9 sarana, dan yang ditindaklanjuti dengan tepat yaitu 8 sarana.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	88.57	88.89	100.36	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	88.57	88.89	100.36	 Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2026 menunjukkan tren yang stabil dengan tetap mendapatkan kriteria "sangat baik". Hal ini mengindikasikan konsistensi Balai POM Ambon dalam menjaga kualitas pemeriksaan sarana

produksi pangan olahan dan kesesuaian tindak lanjutnya. Selain itu efektivitas pengawasan tetap terjaga secara optimal dengan kriteria capaian sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.57	88.89	100.36	 Tercapai / Melampaui

Realisasi capaian indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II TA. 2026 telah tercapai dan melampaui target tahunan. Realisasi sebesar 88,89% dibandingkan dengan target tahunan 88,57% mencerminkan keberhasilan dalam pemenuhan perencanaan pengawasan yang ditetapkan pada awal tahun, di mana setiap sarana produksi pangan olahan yang diperiksa telah tindak lanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku..

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Komitmen petugas terhadap perencanaan yang telah ditargetkan pada TW 2 2026
- monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap pelaporan dan tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan olahan;
- Penetapan target sarana sesuai dengan kapasitas dan kemampuan jenjang jabatan petugas;

- Akurasi pengambilan kesimpulan dan pengkategorian tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yang paling utama yaitu Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

IKSK 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 36. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	99.5	99.8	100.30%	 Sangat Baik

Target Triwulan II Tahun 2026 telah tercapai dan melampaui target. Realisasi sebesar 99,85% menghasilkan capaian kinerja 100,35%, sehingga termasuk

dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi telah berjalan optimal dan melebihi target yang ditetapkan.

Pada pelaksanaan triwulan II, berdasarkan rekomendasi unit pengampu dan Biro perencanaan & keuangan terdapat penyesuaian format dan rumus pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) tingkat Unit pelaksana teknis. Perubahan rumus pada indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang disebutkan mengakibatkan perubahan data realisasi Balai POM di Ambon triwulan I (Januari – Maret). Oleh karena itu, Balai POM di Ambon telah melakukan penyesuaian data pada aplikasi Simetris *ePerformance*.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	99.5	99.56	100.06	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	99.5	99.8	100.30	 Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan II TA. 2026 menunjukkan peningkatan sebesar 0,29 % dibandingkan dengan Triwulan I TA. 2026, yaitu dari 99,56% menjadi 99,85%. Peningkatan tersebut berdampak pada kenaikan capaian kinerja dari 100,06% menjadi 100,35%. Meskipun kenaikannya relatif kecil, capaian pada kedua triwulan tetap berada dalam kategori Sangat Baik yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai ketentuan serta efektivitas pengawasan yang tetap terjaga.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TA. 2026 (%)	REALISASI TW II TA. 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.5	99.8	100.30	 Tercapai / Melampaui

Target tahunan TA. 2026 telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan. Realisasi pada Triwulan II mencapai 99,85%, lebih tinggi 0,35 % dibandingkan target tahunan sebesar 99,50%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,35%. Berdasarkan kriteria penilaian, capaian tersebut termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi telah dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan kinerja, antara lain:

Pada komoditi obat

- Pemenuhan target pemeriksaan sarana terhadap target sarana yang diperiksa yang mencapai 100%, yaitu 38 sarana diperiksa sesuai waktu yang ditetapkan berbanding 38 sarana yang ditargetkan;
- Realisasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan telah sesuai dengan rencana / target pemeriksaan sarana yang ditetapkan;

- Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan timeline pelaporan yang ditetapkan;
- Akurasi pengambilan kesimpulan dan pengkategorian tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku (37 dari 38 sarana)

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu:

- Petugas konsisten memonitoring target per TW sesuai jadwal waktu pelaksanaan pemeriksaan yang telah ditetapkan dan di TL sesuai dengan pedoman
- Pemenuhan target pemeriksaan sarana terhadap target sarana yang diperiksa yang mencapai 100%, yaitu 82 sarana diperiksa sesuai waktu yang ditetapkan berbanding 80 sarana yang ditargetkan;
- Realisasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan telah sesuai dengan rencana / target pemeriksaan sarana yang ditetapkan;

- Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan timeline pelaporan yang ditetapkan;
- Akurasi pengambilan kesimpulan dan pengkategorian tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku (81 dari 82 sarana)

IKSK 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 39. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	95.1	98.43	103.50%	 Sangat Baik

Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 2 2026 sebesar 103,50% dengan kriteria "sangat baik". Capaian diperoleh dari pemenuhan target dan realisasi sejumlah 89 sarana distribusi pangan olahan dari target 95,1% dengan realisasi 98,43%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana pemeriksaan sarana distribusi

pangan olahan serta tindak lanjutnya telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	95.1	98.21	103.27	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	95.1	98.43	103.50	 Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan II TA. 2026 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I TA. 2026. Peningkatan dari 98,21% menjadi 98,43% ini mengindikasikan konsistensi Balai POM dalam meningkatkan dan menjaga kualitas pemeriksaan dan kesesuaian tindak lanjut terhadap distribusi pangan olahan. Meskipun target pada awal tahun 2026 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, efektivitas pengawasan tetap terjaga secara optimal sehingga kriteria capaian tetap terpenuhi dengan sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.1	98.43	103.50	 Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja untuk indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II TA. 2026 dinyatakan telah tercapai dan melampaui target tahunan. Dengan realisasi sebesar 98,43% terhadap target tahunan 95,1% dengan persentase capaian sebesar 103,50%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan dalam pemenuhan perencanaan pengawasan yang ditetapkan sejak awal tahun serta telah tindak lanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

1. Komitmen petugas dalam pemenuhan perencanaan pengawasan sarana
2. Penetapan target sesuai dengan kapasitas dan jenjang jabatan tiap petugas
3. target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilaksanakan sesuai dengan analisa risiko dan dengan mempertimbangan cakupan pengawasan sarana di tiap kabupaten/kota
- 4 monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk kesesuaian dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT
- 5 kompetensi petugas semakin diperbaharui dari waktu ke waktu

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	Tidak ada kendala						

ditindaklanjuti sesuai ketentuan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu:

- Peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk pelatihan terstruktur sesuai tingkat kesulitan pemeriksaan sarana.
- Pelaksanaan pengawasan dengan didukung renlak tahun 2026
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan serta pelaporan secara tepat waktu

IKSK 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara perhitungan pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah:

$$\text{Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan} = (A+B+C+D+E) / 5$$

Keterangan:

- A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
- B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 42. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2026 (%)	REALISASI TW II TA. 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i>	97.63	94.68	96.98%	 Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan II TA. 2026 mencapai 94,68% dari target sebesar 97,63%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 96,98%. Berdasarkan kriteria penilaian, capaian tersebut termasuk kategori Baik . Meskipun target belum tercapai secara penuh, sebagian besar kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	97.63	98.92	101.32	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	97.63	94.68	96.98	 Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan II TA. 2026 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I TA. 2026. Penurunan pada indikator ini disebabkan tidak maksimalnya nilai realisasi pada tiga komoditi yaitu komoditi Iklan kosmetik senilai 99,59, komoditi iklan OBA senilai 88,10, dan komoditi iklan SK senilai 85,71. Hal ini dipengaruhi beberapa penyebab diantaranya Persentase yang diperoleh merupakan akumulasi dari bulan Januari sampai bulan Juni 2026, namun untuk capaian bulan Juni tidak ada kendala (sesuai renlak, tepat waktu dan sesuai hasil keputusan pusat) dan efektivitas pengawasan tetap mampu ditingkatkan sehingga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tetap terjaga dengan sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97.63	94.68	96.98	 Akan Tercapai

Target tahunan TA. 2026 belum tercapai. Realisasi Triwulan II sebesar 94,68% masih berada 2,95 % di bawah target tahunan sebesar 97,63%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 96,98%. Berdasarkan kriteria penilaian, capaian tersebut termasuk kategori Baik ($90\% < x \leq 100\%$). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut agar target tahunan dapat tercapai serta capaian kinerja meningkat ke kategori Sangat Baik.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Komoditi Obat:

- Sebanyak 73 dari 73 iklan obat telah diawasi sesuai rencana pelaksanaan (100%)
- Sebanyak 73 dari 73 iklan obat telah dilaporkan tepat waktu (100%)
- Adanya regulasi yang mengikat (Peraturan BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan) yang mewajibkan pelaku usaha atau instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan

- Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan

Pada komoditi OBA, SK, Kos Kuasi:

- Sebanyak 61 dari 61 iklan kosmetik, 13 dari 14 iklan OBA, 1 dari 1 iklan OK, 7 dari 7 iklan SK telah diawasi sesuai rencana pelaksanaan
- Sebanyak 59 dari 61 iklan kosmetik telah dilaporkan tepat waktu , Iklan OBA SK OK dilaporkan secara tepat waktu

Pada komoditi Pangan Olahan:

- Target dan realisasi iklan TW 1 2026 sebanyak 60 iklan telah dilaksanakan sesuai perencanaan
- Klasifikasi dan proporsi tiap media iklan yang diawasi telah dilaksanakan sesuai dengan SE Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan
- Monitoring pelaksanaan pengawasan media online dan media penyiaran setiap bulan oleh petugas
- Kemampuan petugas melakukan pengawasan iklan pangan olahan semakin memadai

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu:

- Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan untuk seluruh komoditi
- Pelaksanaan pengawasan dengan didukung renlak tahun 2026
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan serta pelaporan secara tepat waktu

IKSK 12. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

1. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
2. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
3. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan

b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)
Untuk cara perhitungan pada indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 45. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman merupakan indikator dengan cascading capaian secara tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan
Triwulan II 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman merupakan indikator dengan cascading capaian secara tahunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman merupakan indikator dengan cascading capaian secara tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Pembentukan PIC pada masing – masing kabupaten / kota yang dibentuk oleh Balai POM di Ambon sehingga dilakukan pemantauan terhadap progress masing – masing kabupaten

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu:

- Pelaksanaan monitoring terhadap pemenuhan data dukung masing – masing kabupaten / kota
- Pelaksanaan Bimtek pengawasan pangan kepada OPD terkait sebagai peningkatan kapasitas SDM pengawas pangan di Porv Maluku

IKSK 13. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik Adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan

berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 48. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	100	108.70	 Sangat Baik

Capaian kinerja untuk indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan II TA. 2026 dikategorikan "Sangat Baik". Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 100%, yang mana angka ini telah melampaui target triwulanan sebesar 92% sehingga capaian sebesar 108,70%. Ini membuktikan bahwa BPOM di Ambon sudah melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan standar yang ditentukan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	92	100	108.70	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	92	100	108.70	 Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II TA. 2026 menunjukkan tren capaian positif yang stabil. Capaian dengan kriteria sangat baik ini mencerminkan

keberhasilan dalam mengoptimalkan rencana pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik di semester I tahun 2026. Pelaksanaan efektivitas pengawasan tetap mampu ditingkatkan hingga mencapai hasil maksimal.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	100	108.70	 Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada Triwulan II TA. 2026 untuk indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah melampaui target tahunan. Dengan realisasi sebesar 100%, angka ini telah melewati target yang ditetapkan untuk sepanjang tahun 2026, yaitu sebesar 92%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 108,70%. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM di Ambon sudah melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan standar yang ditentukan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan kinerja, antara lain:

- 1 Terdapat 72 dari target 72 (100%) label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan 1 tahun 2026;
- 2 Terdapat 72 dari target 72 (100%) label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu sampai dengan Triwulan II tahun 2026;

- 3 Tersedianya standar operasional prosedur (SOP Mikro) pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sehingga menjadikan pelaksanaan pengawasan lebih terstruktur;
- 4 Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan evaluasi label sesuai ketentuan;
- 5 Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu:

- Tersedianya standar operasional prosedur (SOP Mikro) pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sehingga menjadikan pelaksanaan pengawasan lebih terstruktur;
- Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan evaluasi label sesuai ketentuan;

- Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan
- Pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap ketepatan waktu pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik serta pelaporan secara tepat waktu
- Pelaksanaan pengawasan dengan didukung renlak tahun 2026

IKSK 14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% \text{ A} + 25\% \text{ B} + 25\% \text{ C} + 25\% \text{ D}$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotic terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 51. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon</i>	-	-	-	Indeks Tahunan

Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan
Triwulan II 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	-	-	-	Indeks Tahunan

Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang akan mempengaruhi penyebab keberhasilan kinerja, antara lain:

- Terdapat 1 dari 2 kegiatan Bimtek Pengendalian AMR sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2026
- Terdapat 33 dari 33 pemeriksaan apotek sudah menggunakan tools pemeriksaan AMR sesuai ketentuan
- Terdapat 2 dari 4 bahan publikasi terkait pengendalian AMR sudah disusun tepat waktu
- Rencana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana tahunan yang sudah disusun di awal tahun;
- Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan evaluasi label sesuai ketentuan;
- Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan;

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu:

- Rencana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana tahunan yang sudah disusun di awal tahun;
- Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan pemeriksaan sarana apotek sesuai ketentuan;
- Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan;

IKSK 15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain

selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 54. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.8	76.1	101.74%	 Sangat Baik

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, indikator "Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" (Indikator 14) menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada triwulan ini, target yang ditetapkan adalah sebesar 74,8%. Dalam pelaksanaannya, BPOM di Ambon) berhasil mencatatkan realisasi kinerja yang melampaui target, yaitu sebesar 76,1%. Dengan hasil tersebut, persentase capaian kinerja untuk indikator ini menyentuh angka 101,74%. Berdasarkan standar penilaian yang berlaku, capaian ini menempatkan performa UPT pada kriteria "Sangat Baik"

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW II)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	74.7	75.7	101.34	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	74.8	76.1	101.74	 Sangat Baik

Realisasi capaian kinerja pada Indikator 14 menunjukkan adanya tren kenaikan (peningkatan positif) dari Triwulan I ke Triwulan II Tahun 2026:

- Angka realisasi meningkat dari 75,7% pada Triwulan I menjadi 76,1% pada Triwulan II (naik sebesar 0,4%).
- Sejalan dengan hal tersebut, persentase capaian terhadap target juga mengalami kenaikan dari 101,34% pada Triwulan I menjadi 101,74% pada Triwulan II (naik sebesar 0,40%).

Kinerja pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT dinilai mengalami peningkatan yang konsisten dan berhasil mempertahankan performa di atas target yang ditentukan selama dua triwulan berjalan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	78.8	76.1	96.57	 Akan Tercapai

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan pada Indikator 14, status capaian menunjukkan kategori "Akan Tercapai": Hingga Triwulan II TA. 2026, realisasi yang telah dikumpulkan mencapai 76,1% dari total target tahunan sebesar 78,8%. Dengan angka tersebut, progres pemenuhan target tahunan per pertengahan tahun ini sudah menyentuh 96,57%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

- Peningkatan Nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada Triwulan II utamanya didorong oleh capaian optimal pada aspek Standar Ruang Lingkup (SRL) dan aspek Metode Terverifikasi, di mana Laboratorium Kosmetik bertindak sebagai penyumbang nilai yang cukup signifikan.
- Dari sisi Metode Terverifikasi, terjadi peningkatan sebesar 1,7% yang dikontribusikan melalui konsistensi Laboratorium Kosmetik, Laboratorium Obat Bahan Alam (OBA), dan Laboratorium Mikrobiologi dalam melakukan verifikasi

metode demi menjaga validitas hasil pengujian. Angka ini meningkat dari 48,7% pada Triwulan I menjadi 50,4% pada Triwulan II. Dengan bobot aspek sebesar 10% dalam penilaian SKL, kenaikan ini berhasil menyumbang peningkatan nilai SKL total sebesar 0,2%.

- c. Sementara itu, aspek SRL juga mengalami penguatan berkat kenaikan nilai SRL Laboratorium Kosmetik sebesar 2,5% (dari 85% menjadi 87,5%). Hal ini berdampak langsung pada kenaikan rata-rata nilai SRL Balai dari 83,8% menjadi 84,1% (meningkat 0,3%). Mengingat bobot aspek SRL yang cukup besar yaitu 50%, pertumbuhan ini memberikan kontribusi tambahan terhadap kenaikan total nilai SKL sebesar 0,2%.
- d. Di sisi lain, aspek peralatan belum mengalami peningkatan pada triwulan ini dikarenakan proses pengadaan instrumen baru dijadwalkan baru akan terealisasi pada bulan Juli. Selain itu, aspek kompetensi personel saat ini tercatat masih berada di angka 70%. Diharapkan pada triwulan berikutnya, melalui pengadaan baku pembanding yang dinutihkan, aspek kompetensi ini dapat ditingkatkan menjadi 90%. Dengan bobot penilaian sebesar 20%, pencapaian target kompetensi tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak dan meningkatkan nilai SKL secara signifikan sebesar 4% pada triwulan mendatang.

Rekomendasi untuk TW selanjutnya adalah

- a. Mempercepat proses pengadaan dan pemanfaatan baku pembanding yang dibutuhkan untuk memenuhi aspek kompetensi di Lab. Kosmetik.
- b. Melakukan monitoring terhadap proses pengiriman, instalasi, dan kualifikasi instrumen laboratorium baru (pH meter, hot plate, ultasonic dan waterbath) agar terealisasi penuh di bulan Juli tanpa penundaan sehingga dapat meningkatkan nilai di TW selanjutnya.
- c. Mendorong Laboratorium Pangan dan obat untuk konsisten melakukan verifikasi metode dan perluasan ruang lingkup pengujian sesuai perencanaana

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu:

- Kesuaian Rencana dan Pelaksanaan Program Peningkatan Metode terverifikasi dan Peningkatan SRL di TW 2 telah meningkatkan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sedangkan Kegiatan yang Mengalami Kendala (Faktor Penghambat) yaitu:

- Belum adanya kenaikan nilai pada aspek ini disebabkan oleh siklus pengadaan instrumen baru (seperti pH meter, hot plate, ultrasonic, dan waterbath) yang secara administratif baru dijadwalkan terealisasi fisik pada bulan Juli.
- Capaian aspek kompetensi yang masih berada di angka 70% dipengaruhi oleh belum terpenuhinya kebutuhan baku pembanding penunjang secara menyeluruh di laboratorium.

Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan Efektivitas KIE di masing – masing wilayah kerja Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

IKSK 16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

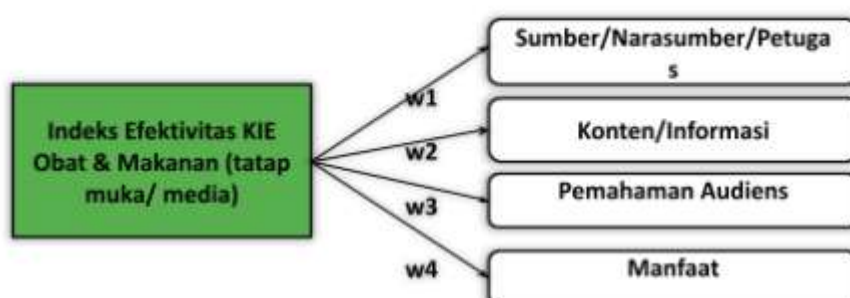
Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Rumus dan perhitungan efektivitas KIE Adalah sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
--	---

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 57. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Tahunan 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	91.4	95.24	104.20%	 Sangat Baik

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM Ambon adalah 95.28 Sehingga capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 104.20 % dengan kriteria “Sangat Baik”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	91.4	95.38	104.35	 Sangat Baik
Triwulan II 2026	91.4	95.24	104.20	 Sangat Baik

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada TW II 2025 95.24 dibandingkan capaian TW I 2026 yaitu 95.38 dengan capaian 104.20% masuk kedalam kriteria “Sangat Baik”. Terdapat sedikit penurunan capaian dari capaian TW sebelumnya namun masih diatas target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	91.4	95.24	104.20	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Triwulan II Tahun 2026 adalah 95.24 dibandingkan target Tahun 2026 yaitu 91.40, dengan capaian 104,35% masuk kedalam kriteria “Tercapai / Melampaui”.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens
- KIE yang dilaksanakan efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat (peserta) terhadap obat dan makanan.
- Telah memastikan setiap peserta/responden mengisi survei efektivitas KIE.
- Adanya peningkatan jumlah responden KIE media seiring dengan banyaknya permintaan edukasi kepada mahasiswa dari kampus di Maluku.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak ada kendala	-					

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu KIE yang dilaksanakan efektif meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap obat dan makanan aman serta memastikan responden memahami pengisian kuesioner

IKSK 17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

A. Sekolah Full Intervensi:

- advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
- Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

B. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 60. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahunan 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i>	70	70	100.00%	 Baik

Realisasi Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada TW 2 tercapai dengan persentase 70% dengan persentase 100% jika dibandingkan dengan target yakni 70%. Adapun penjabaran realisasi tersebut meliputi tahapan Advokasi terpadu dengan persentase realisasi 25%, tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan 20% dan tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan 25%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	15	15	100.00	 Baik
Triwulan II 2026	70	70	100.00	 Baik

Persentase realisasi TW 2 jika dibandingkan dengan realisasi TW sebelumnya mengalami peningkatan karena pada TW sebelumnya program ini masih dalam tahapan pre advokasi dengan pemerintah daerah sedangkan pada TW ini sudah memasuki beberapa tahapan penting.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	70	70.00	 Perlu Upaya Keras

Realisasi TW 2 jika dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai 70% dengan kriteria perlu upaya keras. Hal ini karena masih ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan pada TW selanjutnya sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan Program ini

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

1. Keberhasilan dari capaian program sapa sekolah pada TW 2 ini dipengaruhi oleh koordinasi antara BPOM Ambon dan Pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan dalam penentuan lokus dan pemberian rekomendasi sekolah oleh OPD terkait
2. Faktor pendukung keberhasilan yang lain yakni Komitmen dari kepala sekolah dan komunitas sekolah dalam mengikuti tahapan program sekolah dengan pembudayaan keamanan pangan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan turut ditunjang oleh adanya SK tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan (SK TKPPOM)di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu rencana aksi dari SK TKPPOM tersebut.

IKSK 18. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 63. Jumlah Desa Pangan Aman Tahunan 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Jumlah Desa Pangan Aman</i>	70	70	100.00%	 Baik

Realisasi Program Desa Pangan Aman pada TW 2 tercapai dengan persentase 70% dengan persentase 100% jika dibandingkan dengan target yakni 70%. Adapun penjabaran realisasi tersebut meliputi tahapan Advokasi terpadu dengan persentase realisasi 25%, tahapan Bimtek Kader Desa 25% dan tahapan Bimtek Komunitas Desa 20%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	15	15	100.00	 Baik
Triwulan II 2026	70	70	100.00	 Baik

Persentase realisasi TW 2 jika dibandingkan dengan realisasi TW sebelumnya mengalami peningkatan karena pada TW sebelumnya program ini masih dalam tahapan pre advokasi dengan pemerintah daerah sedangkan pada TW ini sudah memasuki beberapa tahapan penting.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Desa Pangan Aman	100	70	70.00	 Perlu Upaya Keras

Realisasi TW 2 jika dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai 70% dengan kriteria perlu upaya keras. Hal ini karena masih ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan pada TW selanjutnya sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan Program ini

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan Program Desa Pangan Aman dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan PIC UPT dalam melaksanakan persiapan advokasi
- Faktor pendukung keberhasilan yang lain yakni ada Komitmen dari pemerintah desa dalam pembentukan tim keamanan pangan di desanya melalui penerbitan SK Kader Keamanan Pangan Desa dan SK Komunitas Keamanan Pangan Desa tepat waktu sehingga pelaksanaan tahapan sesuai dengan timeline

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah desa pangan aman	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan program desa pangan aman turut ditunjang oleh adanya SK tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan (SK TKPPOM) di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu rencana aksi dari SK TKPPOM tersebut.

IKSK 19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan

terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Perhitungan realisasi pasar pangan aman berbasis komunitas berdasarkan tahapan intervensi pada tabel berikut:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli
Total Skor		100%	

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 66. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahunan 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</i>	70	70	100.00%	 Baik

Realisasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada TW 2 tercapai dengan persentase 70% dengan persentase 100% jika dibandingkan dengan target yakni 70%.

Adapun penjabaran realisasi tersebut meliputi tahapan Advokasi terpadu dengan persentase realisasi 25%, tahapan Bimtek dan Penyuluhan Pasar 25% dan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan 20%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	15	15	100.00	 Baik
Triwulan II 2026	70	70	100.00	 Baik

Persentase realisasi TW 2 jika dibandingkan dengan realisasi TW sebelumnya mengalami peningkatan karena pada TW sebelumnya program ini masih dalam tahapan pre advokasi dengan pemerintah daerah sedangkan pada TW ini sudah memasuki beberapa tahapan penting.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	70	70.00	 Perlu Upaya Keras

Realisasi TW 2 jika dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai 70% dengan kriteria perlu upaya keras. Hal ini karena masih ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan pada TW selanjutnya sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan Program ini.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan Pasar Aman Berbasis Komunitas dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

- Keberhasilan dari capaian program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada TW 2 ini dipengaruhi oleh koordinasi antara BPOM Ambon dan Pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan dalam penentuan lokus dan pemberian rekomendasi sekolah oleh OPD terkait
- Faktor pendukung keberhasilan yang lain yakni Komitmen dari pemerintah daerah dan petugas pengelola pasar dalam membangun dan membenahi pasar di daerahnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan program pasar aman berbasis komunitas turut ditunjang oleh adanya SK tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan (SK TKPPOM) di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu rencana aksi dari SK TKPPOM tersebut. Pemerintah Seram Bagian Barat juga memiliki antusiasme dan perhatian yang besar dalam membenahi kondisi pasar di daerahnya.

Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

IKSK 20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan

- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 69. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	70	70.28	100.40%	 Sangat Baik

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada TW II tahun 2026 sebesar 70,70% terhadap target 35% dengan

capaian sebesar 100,40% dengan kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini disebabkan perencanaan kegiatan pendampingan UMK pada TW 2 telah berjalan dengan baik, diantaranya pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pendampingan, serta penerbitan sertifikat CPOBAB Bertahap

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 70. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	35	25.23	72.09	 Cukup
Triwulan II 2026	70	70.28	100.40	 Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan II TA. 2026 menunjukkan peningkatan dengan nilai 70,28% terhadap target 70% sehingga capaian 100,40% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I TA. 2026 sebesar 25,23% terhadap target 35,00% dengan capaian 72,09%. Peningkatan realisasi terhadap target pada tri wulan II tahun 2026 menunjukkan pelaksanaan program pendampingan UMKM yang ditetapkan pada awal tahun telah berjalan sesuai tahapan dan jadwal pendampingan, diantaranya target pelaksanaan bimbingan teknis yang belum terlaksana pada tri wulan I namun telah terealisasi pada tri wulan II.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>	35.14	70.28	200.00	 Tercapai / Melampaui

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 70,28% dengan kriteria "Akan Tercapai". Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan pendampingan UMKM berjalan sesuai tahapan pendampingan UMKM berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Telah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis yang sebelumnya tidak terlaksana pada TW 1
- Pelaksanaan tahapan pendampingan UMK lainnya sesuai jadwal, diantaranya fasilitasi pendampingan penyiapan sarana prasarana dan dokumen
- Penerbitan CPOBAB Bertahap 1 UMK yang lebih cepat dari target
- Komitmen fasilitator dalam melaksanakan pendampingan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Perbedaan informasi data perizinan pada aplikasi OSS dan e-sertifikasi sehingga proses perizinan terhambat / tertunda	Peningkatan pemahaman pelaku UMK	Desk konsultasi dengan pelaku UMK terkait	TW III	Y	O-99	Informasi data perijinan usaha seperti alamat yang diinput dalam aplikasi Online Single Submission RBA berbeda dengan yang diinput pada aplikasi e sertifikasi
		Dokumen perizinan pelaku UMK hampir seluruhnya disiapkan/disusun oleh fasilitator UPT oleh karena pemilik UMK/karyawannya tidak / belum aware terhadap pentingnya dokumen perizinan	Kolaborasi dengan instansi / stakeholder pembina UMK dimaksud	Komunikasi dengan stakeholder terkait untuk berbagi tanggungjawab dalam peningkatan kapasitas pelaku UMK sekaligus membantu penyiapan dokumen perizinan	TW III	Y	O-130	Proses Pendampingan UMKM dan dokumen disiapkan oleh petugas balai

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaksanaan bimbingan teknis sehingga meningkatkan kapasitas dari pelaku UMK dalam pemenuhan persyaratan pada sebagian besar tahapan pendampingan.
- Pelaksanaan tahapan program pendampingan UMK

Sasaran Kegiatan IV

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 4 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

IKSK 21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%)$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 72. Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>	55	100	181.82%	 Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada tri wulan 2 tahun 2026 sebesar 100,00% terhadap target 55,00% dengan capaian 181,82% dengan kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan realisasi penanganan perkara yang berjalan lebih cepat dari yang direncanakan / diperkirakan, yaitu keberhasilan penanganan perkara diperkirakan akan terealisasi sampai dengan penyerahan tahap 2 pada

akhir tri wulan 3, namun pada kenyataannya berjalan lebih cepat dan telah terealisasi pada akhir triwulan 2.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 73. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	0	0	0	 Kurang
Triwulan II 2026	55	100	181.82	 Tidak dapat disimpulkan

Realisasi kinerja pada Triwulan II TA. 2026 menunjukkan peningkatan dengan nilai realisasi 100,00% terhadap target 55,00% sehingga capaian 181,82% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I TA. 2026 yang masih berada pada angka 0%. Peningkatan realisasi terhadap target pada tri wulan II tahun 2026 menunjukkan intensitas koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh PPNS dengan APH terkait dalam penanganan perkara, sehingga perkara dapat diselesaikan lebih cepat dari perencanaan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 74. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>	77.5	100	129.03	 Tercapai / Melampaui

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT pada triwulan II tahun 2026 sebesar 100,00% dan capaian terhadap target tahunan adalah 129,03% dengan kriteria "Tercapai/Melampaui". Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian penanganan perkara telah melampaui target tahunan yang telah ditetapkan dengan waktu singkat.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Informasi intelijen yang akurat dan presisi
- Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum serta stakeholder lainnya dalam proses penanganan perkara
- Komitmen PPNS dalam penanganan perkara sesuai aturan hukum yang berlaku
- Tidak adanya perkara carry over dari tahun sebelumnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Pendalaman informasi ataupun penanganan kasus tidak dapat dilaksanakan pada salah satu kabupaten oleh karena biaya transportasi yang sangat mahal	Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka minimalisir terjadinya tindak pidana	Komunikasi dengan APH lainnya untuk penanganan perkara, koordinasi cengan ekspedisi untuk pemotongan jalur distribusi dengan melakukan pengamanan paket	TW III	Y	O-147	Penanganan informasi terkait pengiriman sediaan farmasi ilegal tidak dapat dilakukan pada salah 1 kabupaten dengan biaya transportasi yang mahal.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Kegiatan penggalangan yang dilaksanakan bersama stakeholder terkait di bidang intelijen maupun penyidikan yang memperkuat komitmen bersama terutama Aparat Penegak Hukum
- Gelar kasus dan gelar perkara yang kontinyu dilakukan dengan berbagai pihak dan pada setiap tahapan penanganan perkara

Sasaran Kegiatan V

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

IKSK 22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12

Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 75. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	50	50	100.00	 Baik

Realisasi Persentase Laporan analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tri wulan 2 tahun 2026 sebesar 50,00% terhadap target 50,00% dengan capaian 100,00% dengan kriteria capaian “Baik”. Hal ini disebabkan kegiatan patroli siber dan profiling telah dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu, serta pelaporan kegiatan cegah tangkal melalui dashbord penindakan secara rela time dan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dari direktorat cegah tangkal

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	50	50	100.00	 Baik
Triwulan II 2026	50	50	100.00	 Baik

Realisasi indikator Persentase Laporan analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tri wulan 2 tahun 2026 sebesar 50,00% terhadap target 50,00% dengan capaian 100,00% tidak terjadi penurunan dibandingkan realisasi pada tri wulan 1 sebesar 50,00% terhadap target 50,00% dengan capaian 100,00% . Yang membedakan pencapaian pada tri wulan 2 dibandingkan tri wulan 1 adalah bahwa pada tri wulan 1 pencapaian ditentukan hanya melalui pelaporan patroli siber dan profiling, serta laporan cegah tangkal yang dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu, sedangkan pada tri wulan 2 selain pelaporan patroli siber, profiling, dan pelaporan cegah tangkal, tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan juga berperan dalam pencapaian tersebut.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	100	50	50.00	 Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator Persentase Laporan analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan 2 sebesar 50,00% terhadap target tahunan 100,00% pencapaiannya adalah 50,00% dengan kriteria "Perlu Upaya Keras". Hal ini disebabkan pada tri wulan 2 baru terealisasi sebagian kegiatan (50,00%) dari target keseluruhan dalam 1 tahun, namun berdasarkan progress pelaporan dan tindak lanjut yang dilaksanakan pada tri wulan 1 dan triwulan 2, indikator ini optimis dapat dicapai pada akhir tahun 2026.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Keberhasilan kegiatan intelijen yang dilakukan secara berkala
- Laporan patroli siber dan profiling yang dilakukan secara konsisten dan tepat waktu setiap bulan
- Laporan cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan melalui dashbord penindakan secara real time
- Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Keterlambatan mengeksekusi laporan informasi intelijen, sehingga mengakibatkan keterlambatan pencegahan pengiriman produk OOT	pengalihan penanganan perkara ke APH lainnya	Koordinasi dengan APH terkait untuk pengalihan penanganan perkara	Tahun 2026	Y	O-146	Kegagalan pencegahan pengiriman obat-obat tertentu tanpa keahlian dan kewenangan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaporan kegiatan patroli siber dan profiling melalui aplikasi inawebcrawler sehingga mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pelaporan;
- Pelaporan cegah tangkal melalui dashboard penindakan sehingga laporan dapat disampaikan secara realtime;
- Layanan konsultasi dari direktorat siber dan cegah tangkal, sehingga mempermudah dalam penyelesaian kendala/permasalahan dalam kegiatan siber dan cegah tangkal.

Sasaran Kegiatan VI

Layanan Publik UPT yang prima

Sasaran Kegiatan 6 Layanan publik UPT yang prima terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

IKSK 23. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Untuk formula dan perhitungan indikator ini Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan

Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai Adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 78. Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 79. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Triwulan II 2026	-	-	-	Indeks Tahunan
------------------	---	---	---	----------------

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 80. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>	4,90	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

- Telah dilakukan pengisian Lembar Penilaian UPP, data dukungnya dan pengisian F03 pada Evortal serta telah dilakukan desk bersama evaluator pusat
- Pemenuhan data dukung pada tiap komponen penilaian.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Koordinasi dan kolaborasi tim kerja internal BPOM dalam memenuhi data dukung penilaian UPP;
- Pembagian PIC yang jelas dalam pemenuhan data dukung;
- Terlaksananya Forum Konsultasi Publik sebagai wadah dalam menerima masukan terhadap standar pelayanan.

Sasaran Kegiatan VII

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
2. Nilai AKIP UPT BPOM
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

IKSK 24. Nilai Pembangunan ZI

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat

menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 81. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di BPOM Ambon Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

Berdasarkan nota dinas Inspektur utama nomor: PI.06.06.7.07.26.405, perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM Tahun 2026 pada Balai POM di Ambon telah didapatkan realisasi nilai pembangunan ZI yaitu 84,21. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 87,26 maka capaian tahun 2026 yaitu 96,50% dengan kriteria **“Baik”**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 82. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan
Triwulan II 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,26	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM Tahun 2026 pada Balai POM di Ambon, secara ringkas hasil evaluasi sebagai berikut:

- Unit kerja telah menetapkan Tim pembangunan ZI namun belum terdapat dokumentasi kertas kerja pemilihan ketua/anggota tim untuk memastikan pemilihan sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang berlaku
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap rencana kerja pembangunan ZI, namun pada laporan monev belum terdapat informasi tentang timeline pelaksanaan kegiatan dan atas rencana kerja yang belum terealisasi belum terdapat penjelasan terkait kendala/hambatan dan rencana tindak lanjutnya;
- Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir namun belum mampu mengurangi resistensi atas perubahan;
- Keterlibatan semua pegawai dalam pembangunan ZI belum terdokumentasi dengan memadai;
- SOP Mikro inovasi telah ditetapkan oleh unit kerja, tetapi belum terdapat bukti implementasi yang memadai;
- Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik telah dilakukan secara berkala, namun belum sepenuhnya menyajikan hambatan/ kendala dan tindak lanjutnya;

- Monitoring data dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen dan hasil pengembangan kompetensi belum dikaitkan terhadap perbaikan kinerja;
- Telah terdapat kebijakan yang mengatur pola mutasi pegawai antar jabatan namun hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan implementasi pelaksanaan mutasi belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- Rencana pengembangan kompetensi pegawai telah disusun namun belum mempertimbangkan hasil kinerja pegawai;
- Belum terdapat kertas kerja perbandingan antara standar kompetensi dengan kompetensi yang sudah dimiliki pegawai sehingga persentase kesenjangan kompetensi pegawai belum terukur;
- Unit kerja telah melakukan upaya dalam peningkatan kompetensi pegawai namun belum dilaksanakan kepada seluruh pegawai;
- Pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu di tingkat unit kerja telah dilaksanakan namun pada surat ketetapan unit kerja belum terdapat mekanisme perhitungan reward;
- Masih terdapat pelanggaran terkait disiplin pegawai pada tahun 2025;
- Pimpinan terlibat dalam tahapan penyusunan perencanaan namun arahan pimpinan belum terdokumentasi secara memadai;
- Terdapat pemberian reward and punishment dengan salah satu unsur penilaiannya dari capaian kinerja namun belum menjadi komponen terbesar dalam pemberian reward and punishment;
- Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dan juga membuat inovasi, namun belum terdapat laporan pelaksanaan inovasi yang menunjukkan progres dan dampak secara nyata sebelum dan sesudah adanya inovasi;
- Belum terdapat bukti bahwa terdapat mekanisme pengendalian seluruh aktivitas telah dilakukan secara berjenjang;

- Dalam pelaksanaan pelayanan publik telah dibangun inovasi, namun sebagian besar inovasi pelayanan belum dibangun berdasarkan dengan isu strategis dan belum terdapat dampak outcome, serta belum seluruhnya telah mendorong perbaikan pelayanan publik.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Melaksanakan pemilihan Tim Kerja Pembangunan ZI dengan mempertimbangkan kriteria pada pedoman yang telah ditetapkan dan mendokumentasikan kertas kerja pemilihan tim secara memadai;
- Menyempurnakan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI dengan menambahkan informasi berupa timeline pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan, serta penjelasan hambatan atau dan rencana tindak lanjutnya atas rencana kerja yang belum terealisasi;
- Melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir serta menyusun strategi untuk meningkatkan indeks BerAKHLAK Unit Kerja;
- Mendokumentasikan usulan/masukan terkait pembangunan ZI dari pegawai secara memadai;
- Mendokumentasikan pelaksanaan seluruh alur dalam SOP Mikro Inovasi;
- Menetapkan rencana aksi tindak lanjut yang relevan dengan kendala pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi

SDM, dan pemberian pelayanan publik serta mendokumentasikan hasil pelaksanaan rencana aksi tersebut;

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai rekrutmen dan hasil pengembangan pegawai yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja;
- Menyempurnakan kebijakan terkait pola mutasi/rotasi unit kerja dengan menjadikan hasil assessment sebagai dasar pelaksanaan mutasi/rotasi internal dan mendokumentasikan seluruh tahapan pelaksanaan mutasi internal pegawai sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
- Membuat perencanaan pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan hasil kinerja dari masing-masing pegawai;
- Menyusun kertas kerja perbandingan antara standar kompetensi dan kompetensi yang sudah dimiliki pegawai sehingga dapat terukur kesenjangan kompetensi pegawai;
- Melakukan upaya dalam peningkatan kompetensi pegawai kepada seluruh pegawai;
- Menyempurnakan ketetapan unit kerja tentang pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu di tingkat unit kerja dengan mekanisme perhitungan yang jelas;
- Membangun lingkungan pengendalian untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait fraud/disiplin/kode etik/kode perilaku;
- Mendokumentasikan arahan pimpinan dalam tahapan penyusunan perencanaan secara memadai;
- Menyempurnakan kebijakan pemberian reward and punishment dengan menjadikan hasil capaian kinerja sebagai komponen utama penilaian;
- Menyusun laporan pelaksanaan inovasi terkait pengaduan masyarakat yang menunjukkan progres dan dampak secara nyata sebelum dan sesudah adanya inovasi;

- Memastikan implementasi mekanisme pengendalian seluruh aktivitas telah dilakukan secara berjenjang guna menghasilkan peningkatan kinerja yang lebih efektif, efisien, dan terkendali;
- Membangun dan mengembangkan inovasi pelayanan publik berdasarkan isu strategis unit kerja, menyusun analisis dampak inovasi yang menunjukkan outcome dan memastikan inovasi-inovasi yang dibangun unit kerja berdampak secara nyata untuk mendorong pelayanan publik;
- Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

IKSK 25. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing – masing komponen Adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	> 30 - 50	Kurang Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 84. Nilai AKIP UPT BPOM di BPOM Ambon TW II Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai AKIP UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 85. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan
Triwulan II 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai AKIP UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 86. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	80,00	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai AKIP UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang berdasarkan masing – masing komponen adalah:

- Target kinerja untuk tahun 2025-2029 pada Balai POM di Ambon belum seluruhnya didukung dengan kertas kerja perhitungan target secara komprehensif yang menyajikan baseline data, analisis serta metode perhitungan.
- Pengukuran data capaian kinerja belum didukung dengan kertas kerja perhitungan capaian kinerja yang dilengkapi dengan penjelasan data sumber (raw data) yang telah dimanfaatkan agar memudahkan proses mampu telusur
- Laporan Evaluasi Internal (LEI), Laporan Kinerja Interim, dan Laporan Kinerja Tahunan telah menyajikan data capaian kinerja, kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjut, namun belum menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode pelaporan sebelumnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM							

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Menetapkan target kinerja baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah dengan berdasarkan analisa perhitungan dan dokumentasi yang memadai, tidak terbatas pada mempertimbangkan hasil capaian kinerja sebagai data dukung penetapan target kinerja;
- Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja;
- Menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim dan Tahunan dilengkapi dengan simpulan status rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut (selesai/belum selesai).

IKSK 26. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator

dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 87. Nilai Kinerja Anggaran UPT di BPOM Ambon TW II Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW II)

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan
Triwulan II 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah:

- Memastikan penyesuaian RPD Halaman III sesuai dengan realisasi anggaran pada bulan berjalan tahun 2026
- Melaporkan capaian output tepat waktu setiap bulan
- Menjaga penyerapan anggaran agar sesuai dengan target penyerapan masing-masing jenis belanja di tiap triwulan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03 - Nilai Kinerja							

Anggaran UPT BPOM								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

IKSK 27. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan / sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 90. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di BPOM Ambon Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW II 2026 (%)	REALISASI TW II 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

Tabel 91. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (TW I)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan
Triwulan II 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>	3,10	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Terdapat rekomendasi kepada Balai POM di Ambon agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Proses identifikasi risiko telah dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsi, namun belum terdapat bukti terdokumentasi yang memadai bahwa pimpinan unit kerja telah memberikan masukan/arahan terkait implementasi manajemen risiko di unit kerjanya;
- b. Terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko;
- c. Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Tidak ada kendala						

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Agar meningkatkan komitmen dan keterlibatan dalam proses pengelolaan manajemen risiko diantaranya dibuktikan dengan memberikan masukan/arahan yang terdokumentasi secara memadai atas implementasi manajemen risiko di unit kerjanya;
- Menyelaraskan aktivitas pengendalian saat ini (existing control) dengan risk event/penyebab/akibat;
- Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko diantaranya melalui sertifikasi QRMA/QRMO dan Bimtek untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 93. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai			-	-	-
2	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
3	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
4	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
5	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
6	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
7	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
8	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
9	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	Terdapat 1 sarana pelayanan kefarmasian yang penentuan	Peningkatan kompetensi petugas melalui	Pembelajaran mandiri oleh pegawai dan bimbingan	Selesai		Juni 2026	T		

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6			7	8	9
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tindak lanjutnya tidak sesuai dengan ketentuan	pembelajaran mandiri	oleh Ketua Tim						
10	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
11	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
12	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
13	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
14	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1. Rendahnya nilai aspek verifikasi dan aspek kompetensi pada laboratorium kosmetik	Membuat perencanaan verifikasi dan pemenuhan aspek kompetensi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan verifikasi dan aspek kompetensi, serta mutasi internal dan eksternal personel pengujian	Selesai		Juni 2026	T		
15	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
16	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
17	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6			7	8	9
	pembudayaan keamanan pangan									
18	03 - Jumlah desa pangan aman	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
19	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
20	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	libur panjang cuti bersama pada bulan maret sehingga persiapan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tidak optimal	Penyesuaian jadwal kegiatan yang tidak berjalan pada TW I 2026	Mengagendakan jadwal bimbingan teknis pada bulan april 2026	Selesai		April 2026	T		
21	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
22	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
23	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
24	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
25	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
26	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
27	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	- Kurangnya sosialisasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman manajemen risiko yang menyeluruh - risk register terlalu kompleks	- Membuat program pelaksanaan sosialisasi manajemen risiko yang berkesinambungan untuk seluruh pegawai BPOM di	- Telah berkoordinasi dan menyiapkan pelatihan di bulan Juli-Agustus diantaranya pendanaan dan akomodasi	Selesai		Desember 2026	T	O-83	Pegawai belum sepenuhnya memahami risiko yang menjadi tanggung jawabnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6			7	8	9
			Ambon - Mengefisienkan risk register	- Menyederhanakan risk register dari 200 menjadi 98, dengan menyatukan risk yang sama, menghilangkan risiko yang tidak muncul lagi atau dalam level yang sangat rendah.						
		aktivitas pengendalian (existing control) dengan risk event/penyebab/ akibat tidak selaras	- Mengevaluasi kembali tiap risk event dan menganalisa akar penyebab yang tepat - Memprioritaskan tindakan pengendalian utama	- Bersama sama menelaah kembali dan menganalisa akar penyebab masalah dalam rapat atara pagawai-tim SPI-kepala Balai POM di Ambon. - Setelah menemukan 1 pengendalian utama yang cocok , dilakukan secara konsisten.	Selesai		Desember 2026	T	O-94	Resiko tidak selesai ditindaklanjuti

3.4 Realisasi Anggaran

Satuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp14.598.751.000,00 Selama periode berjalan, Balai POM di Ambon telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 11 (Sebelas) kali dari DIPA awal Rp 16.377.853.000,00 menjadi Rp14.598.751.000,00 yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

Tabel 94. Revisi Anggaran tahun 2026

No	Alasan Revisi	Surat Penetapan Revisi DIPA	Tanggal	Pagu Awal
0	Pagu Awal	0580-0442-8604-8558	24-Dec-25	16,377,853,000.00
1	Penyesuaian Halaman III DIPA	3017-6220-3400-2700	27-Dec-25	14,640,686,000.00
2	Penyesuaian Halaman III DIPA	3017-6220-3400-2700	25-Jan-26	14,640,686,000.00
3	Penyesuaian Halaman III DIPA	3017-6220-3400-2700	12-Feb-26	14,640,686,000.00
4	Penyesuaian Halaman III DIPA	3017-6220-3400-2700	26-02-2026	14,640,686,000.00
5	Penyesuaian Halaman III DIPA	3017-6220-3400-2700	13-Apr-26	14,640,686,000.00
6	Penyesuaian Halaman III DIPA	7215-4176-5910-9897	25-Apr-26	14,624,741,000.00
7	Penyesuaian Halaman III DIPA	7215-4176-5910-9897	29-Apr-26	14,624,741,000.00
8	Penyesuaian Halaman III DIPA	7215-4176-5910-9897	6-May-26	14,624,741,000.00
9	Penyesuaian Halaman III DIPA	7215-4176-5910-9897	18-May-26	14,624,741,000.00
10	Penyesuaian Halaman III DIPA	2687-9024-0462-4883	4-Jun-26	14,598,751,000.00
11	Penyesuaian Halaman III DIPA	2687-9024-0462-4883	28-Jun-26	14,598,751,000.00

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 95. Anggaran Semula dan Revisi Anggaran Juni Tahun 2026

Uraian	Periode 30 Juni 2026		
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan			
Pendapatan Jasa	271,685,000.00	271,685,000.00	-
Jumlah Pendapatan	271,685,000.00	271,685,000.00	-
Belanja			
Belanja Pegawai	4,972,020,000.00	4,972,020,000.00	-
Belanja Barang	9,363,395,000.00	7,992,780,000.00	(1,370,615,000)
Belanja Modal	2,042,438,000.00	1,633,951,000.00	(408,487,000)

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Barang mengalami penurunan sebesar (Rp1.370.615.00,00) karena Efisiensi Anggaran.
2. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (Rp408.487.000,00) karena Efisiensi Anggaran.

A. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 96. Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,77	99,58	101,85	628.570.000	377.312.324	60,03

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				12.767.000	9.750.067	76,37
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,7	99,79	102,14	101.455.200	52.226.162	51,48
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0,00	113.231.800	60.447.916	53,38
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70	120.313.800	56.472.065	46,94
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,99	95,19	102,37	59.135.000	39.002.234	65,95

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	100	102,04	7.927.200	4.197.800	52,95
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,57	88,89	100,36	9.909.000	5.247.250	52,95
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,5	99,85	100,35	202.852.600	138.630.948	68,34
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,1	99,8	104,94	197.219.800	127.038.537	64,41
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,63	94,68	96,98	82.913.400	51.132.970	61,67

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	100	108,70	17.688.000	2.155.380	12,19
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				69.273.000	34.136.148	49,28
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,8	76,1	101,74	2.892.898.000	2.035.902.240	70,38
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				87.875.200	32.346.910	36,81
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,4	95,24	104,20	74.574.000	7.090.400	9,51
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70	70	100,00	87.627.000	49.549.240	56,55
18	Jumlah desa pangan aman	70	70	100,00	56.565.000	29.328.568	51,85

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00	20.105.000	5.014.400	24,94
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	70	70,28	100,40	20.596.000	10.308.680	50,05
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	100	181,82	226.045.000	123.258.981	54,53
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	10.620.000	10.032.800	94,47
23	Indeks Pelayanan Publik UPT				35.624.000	9.400.395	26,39
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM				2.370.402.500	1.245.979.669	52,56

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
25	Nilai AKIP UPT				2.384.203.500	1.253.126.969	52,56
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT				2.378.252.500	1.252.304.669	52,66
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.372.042.500	1.252.304.669	52,79

B. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja per sasaran kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 97. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	628.570.000	377.312.324	60,03
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	12.767.000	9.750.067	76,37

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	101.455.200	52.226.162	51,48
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	113.231.800	60.447.916	53,38
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	120.313.800	56.472.065	46,94
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	59.135.000	39.002.234	65,95
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	7.927.200	4.197.800	52,95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	9.909.000	5.247.250	52,95
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	202.852.600	138.630.948	68,34
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	197.219.800	127.038.537	64,41
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.913.400	51.132.970	61,67
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	17.688.000	2.155.380	12,19

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	69.273.000	34.136.148	49,28
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	87.875.200	32.346.910	70,38
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2.892.898.000	2.035.902.240	36,81
		TOTAL		4.604.029.000	3.025.998.949	
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	74.574.000	7.090.400	9,51
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	87.627.000	49.549.240	56,55
		18	Jumlah desa pangan aman	56.565.000	29.328.568	51,85

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20.105.000	5.014.400	24,94
		TOTAL		238.871.000	90.982.608	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20.596.000	10.308.680	50,05
		TOTAL		20.596.000	10.308.680	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	226.045.000	123.258.981	54,53
		TOTAL		226.045.000	123.258.981	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	10.620.000	10.032.800	94,47

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		TOTAL		10.620.000	10.032.800	
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	35.624.000	9.400.395	26,39
		TOTAL		35.624.000	9.400.395	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2.370.402.500	1.245.979.669	52,56
		25	Nilai AKIP UPT	2.384.203.500	1.253.126.969	52,56
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	2.378.252.500	1.252.304.669	52,66
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.372.042.500	1.252.304.669	52,79
		TOTAL		9.504.901.000	5.003.715.976	

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran terendah pada sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan persentase realisasi anggaran sebesar 35,71%.

C. Realisasi Anggaran per Kegiatan / output

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan program / kegiatan / output masing - masing ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 98. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	7	50,00%	10.620.000	10.032.800	94,47%
2	BAH.001 Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	175	11	6,29%	35.624.000	9.400.395	26,39%
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	274	152	55,47%	58.202.000	6.590.400	11,32%
4	BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	144	72	50,00%	17.688.000	2.155.380	12,19%

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
5	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0,00%	53.911.000	19.797.300	36,72%
6	BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	6	1	16,67%	16.372.000	600.000	3,66%
7	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00%	1.258.947.000	284.600.286	22,61%
8	QCD.U48 Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Ambon	1	1	100,00 %	200.055.000	110.198.981	55,08%
9	BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	0	0,00%	87.627.000	49.549.240	56,55%

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
10	BDB.002 Desa Pangan Aman	2	0	0,00%	56.565.000	29.328.568	51,85%
11	BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0,00%	20.105.000	5.014.400	24,94%
12	QDC.002 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00 %	12.767.000	9.750.067	76,37%
13	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	8	1	12,50%	20.596.000	10.308.680	50,05%
14	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	318	174	54,72%	422.876.000	201.493.053	47,65%
15	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	933	429	45,98%	628.570.000	318.238.124	50,63%

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
16	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	25	12	48,00%	19.818.000	10.494.500	52,95%
17	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	377	205	54,38%	609.412.000	383.314.485	62,90%
18	RAB.001 Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00%	1.633.951.000	1.117.057.409	68,37%
19	EBA.956 Layanan BMN	1	0	0,00%	4.500.000	-	0,00%
20	EBA.994 Layanan Perkantoran	1	0	0,00%	9.430.545.000	4.153.172.784	44,04%

Berdasarkan tabel di atas, pada realisasi anggaran tertinggi berdsarkan capaian output sampai dengan Triwulan II 2026 yaitu AEA / Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT dengan capaian 94,47%, Sedangkan terendah pada EBA 956 / Layanan BMN dengan capaian 0%. Sedangkan realisasi fisik / volume sampai dengan

triwulan II 2026 tertinggi pada QCD / Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Ambon dan QDC / Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans dengan capaian 100%. Balai POM di Ambon terus berkoordinasi dan tetap melaksanakan seluruh kegiatan selama periode Triwulan II 2026 hal ini dibuktikan dengan penyerapan anggaran pada setiap kegiatan.

Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Ambon tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 99. Tingkat Efisiensi Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Sasaran Kegiatan	Capaian Anggaran	IE	SE	TE	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102,61%	89,64%	1,14	1,00	0,14	100% (Efisien)
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101,05%	92,39%	1,09	1,00	0,09	100% (Efisien)
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,40%	88,90%	1,13	1,00	0,13	100% (Efisien)
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	181,82%	98,57%	1,84	1,00	0,84	88% (Efisien)
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00%	94,47%	1,06	1,00	0,06	100% (Efisien)
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	-	Belum Dapat Ditentukan			
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	-	Belum Dapat Ditentukan			

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat dari 7 Sasaran Kegiatan ada 5 (Lima) Sasaran Kegiatan yang “Efisien”, dan 2 (Dua) Sasaran Kegiatan Belum dapat disimpulkan /

ditentukan karena target di akhir tahun dan belum ada capaian anggaran. Analisis tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektifitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 89,64% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 102,61% dengan hasil TE (0,14) dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran ini sudah berjalan secara efisien. Pencapaian target indikator pada sasaran strategis ini sudah dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang efektif sehingga realisasi anggaran dapat dijalankan dengan maksimal;
2. Sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 92,39% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 101,05% dengan hasil TE (0,09) dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran ini sudah berjalan secara efisien. Pencapaian target indikator pada sasaran strategis ini sudah dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang efektif sehingga realisasi anggaran dapat dijalankan dengan maksimal;
3. Sasaran kegiatan ketiga “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 88,90% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 100,40% dengan hasil TE (0,13) dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran ini sudah berjalan secara efisien. Pencapaian target indikator pada sasaran strategis ini sudah dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang efektif sehingga realisasi anggaran dapat dijalankan dengan maksimal;
4. Sasaran kegiatan keempat “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 98,57% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 181,82% dengan hasil TE (0,84) dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran ini sudah berjalan secara efisien. Pencapaian target indikator pada sasaran strategis ini sudah dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang efektif sehingga realisasi anggaran dapat dijalankan dengan maksimal;
5. Sasaran kegiatan Kelima “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 94,47% sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan hasil TE (0,06) dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran ini sudah berjalan secara efisien. Pencapaian target indikator pada sasaran strategis ini sudah dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang efektif sehingga realisasi anggaran dapat dijalankan dengan maksimal;
6. Sasaran kegiatan keenam “Layanan Publik UPT yang prima” dan ketujuh “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” belum dapat ditentukan karena sasaran kegiatan yang dihitung baru pada akhir tahun 2026.

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2026



Tabel 100. Tingkat Efisiensi per Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,77	99,58	101,85%	380.570.000	377.312.324	99,14%	1,03	0,03	100% Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	Belum dapat ditentukan		
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,7	99,79	102,14%	55.455.200	52.226.162	94,18%	1,08	0,08	100% Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0,00%	65.231.800	60.447.916	92,67%	0,00	-1,00	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70%	55.313.800	56.472.065	102,09%	1,06	0,06	100% Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,99	95,19	102,37%	40.135.000	39.002.234	97,18%	1,05	0,05	100% Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	100	102,04%	7.927.200	4.197.800	52,95%	1,93	0,93	95% Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,57	88,89	100,36%	6.909.000	5.247.250	75,95%	1,32	0,32	95% Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,5	99,85	100,35%	140.852.600	138.630.948	98,42%	1,02	0,02	100% Efisien

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TAHUN 2026



No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian
		T	R	%	T	R	%			
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,1	98,43	103,50%	130.219.800	127.038.537	97,56%	1,06	0,06	100% Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,63	94,68	96,98%	55.913.400	51.132.970	91,45%	1,06	0,06	100% Efisien
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	100	108,70%	2.688.000	2.155.380	80,19%	1,36	0,36	95% Efisien
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	Belum dapat ditentukan		
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,8	76,1	101,74%	2.100.898.000	2.035.902.240	96,91%	1,05	0,05	100% Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	Belum dapat ditentukan		
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,4	95,24	104,20%	7.574.000	7.090.400	93,61%	1,11	0,11	100% Efisien
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70	70	100,00%	50.627.000	49.549.240	97,87%	1,02	0,02	100% Efisien
18	Jumlah desa pangan aman	70	70	100,00%	30.565.000	29.328.568	95,95%	1,04	0,04	100% Efisien
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00%	6.105.000	5.014.400	82,14%	1,22	0,22	95% Efisien
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	70	70,28	100,40%	11.596.000	10.308.680	88,90%	1,13	0,13	100% Efisien

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2026



No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian
		T	R	%	T	R	%			
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	100	181,82%	125.045.000	123.258.981	98,57%	1,84	0,84	88% Efisien
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	10.620.000	10.032.800	94,47%	1,06	0,06	100% Efisien
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	Belum dapat ditentukan		
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	Belum dapat ditentukan		
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	Belum dapat ditentukan		
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	Belum dapat ditentukan		
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	Belum dapat ditentukan		

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat dari 27 Indikator Kinerja 13 (Tiga belas) indikator dengan kriteria “Efisien”, 1 (Satu) indikator “Tidak Efisien”, dan 8 (Delapan) indikator belum dapat disimpulkan karena target di akhir tahun. penyebab indikator yang tidak efisien hal ini disebabkan:

- Penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan masih sedang berlangsung,
- Pada indikator KLB, belum terdapat realisasi capaian hingga triwulan II 2026, karena belum terdapat Kejadia Luar Biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah pengawasan Balai POM di Ambon.

Kedepannya untuk kegiatan dalam mendukung peningkatan indikator kinerja yang sejalan dengan realisasi anggaran akan tetap dilaksanakan pada Triwulan III dan IV tahun 2026 sehingga tingkat efisiensi kinerja dan anggaran dapat berjalan lebih baik.

Tabel 101. Tingkat Efisiensi per *output* Kegiatan

No	PROGRAM / KEGIATAN		IE	TE	KATEGORI
1	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0,53	-0,47	EFISIEN
2	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0,24	-0,76	EFISIEN
3	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	4,90	3,90	EFISIEN
4	BIA001	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	4,10	3,10	
5	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0,00	-1,00	EFISIEN
6	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	4,55	3,55	EFISIEN

No	PROGRAM / KEGIATAN		IE	TE	KATEGORI
7	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0,00	-1,00	EFISIEN
8	QCDU48	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Ambon	1,82	0,82	EFISIEN
9	BDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	0,00	-1,00	EFISIEN
10	BDB002	Desa Pangan Aman	0,00	-1,00	EFISIEN
11	BDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	0,00	-1,00	EFISIEN
12	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	1,31	0,31	EFISIEN
13	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0,25	-0,75	EFISIEN
14	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,15	0,15	EFISIEN
15	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	0,91	-0,09	EFISIEN
16	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0,91	-0,09	EFISIEN
17	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0,86	-0,14	EFISIEN
18	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0,00	-1,00	EFISIEN

No	PROGRAM / KEGIATAN		IE	TE	KATEGORI
19	EBA956	Layanan BMN	0,00	0,00	EFISIEN
20	EBA994	Layanan Perkantoran	0,00	-1,00	EFISIEN

Pada triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan / Program untuk mendukung pencapaian 7 sasaran kegiatan dengan hasil semua kegiatan **Efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 0,67. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah tingkat efisiensinya. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Ambon mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis 2025-2029, Laporan Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon sebagai media pertanggung jawaban atas capaian kinerja Balai POM di Ambon pada Triwulan II Tahun 2026, atas segala permasalahan dan kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya untuk membuat langkah-langkah dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja Balai POM di Ambon pada Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

- Secara keseluruhan BPOM di Ambon tetap berkomitmen mengawal capaian sampai Triwulan II Tahun 2026 agar dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya
- Diperoleh nilai NKO total sebesar 102,41%, Dengan kategori **“Istimewa”**.

Pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan penilaian pada sasaran kegiatan untuk mengetahui keberhasilan kinerja. Nilai capaian keberhasilan tiap sasaran kegiatan Balai POM di Ambon Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” dengan nilai sebesar 102,61% dengan kriteria **“Sangat Baik”**;
2. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan nilai sebesar 101,05% dengan kriteria **“Sangat Baik”**;
3. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan nilai sebesar 100,40% dengan kriteria **“Sangat Baik”**;

4. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan nilai sebesar 181,82% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**;
5. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 100% dengan kriteria **“Baik”**;
6. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Layanan Publik UPT yang prima” namun belum dapat dinilai karena merupakan **“Indeks Tahunan”**;
7. Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” namun belum dapat dinilai karena merupakan **“Indeks Tahunan”**;

SARAN

Secara keseluruhan penilaian Sasaran Strategis yang telah dilakukan menunjukkan hasil capaian Nilai kinerja Organisasi sebesar 102,41% dengan predikat **“Istimewa”**. Oleh karena itu perlunya konsistensi monitoring dan perbaikan secara berkala untuk memaksimalkan pencapaian kinerja BPOM Ambon.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Ambon sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus diperbaiki :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI yang dilaksanakan setiap bulan secara konsisten
2. Meningkatkan kecepatan upload Data dukung monev renja Pembangunan ZI bulanan secara berkala
3. Meningkatkan pengawasan kearsipan mencakup aspek penciptaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan termasuk sumber daya manusia,

prasarana dan sarana kearsipan secara berkala terkait kesesuaian pengelolaan arsip pada Balai POM di Ambon

4. Meningkatkan komunikasi aktif melalui WA grup BPOM di Ambon dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan.
5. Meningkatkan pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens.
6. Meningkatkan optimalisasi eksternalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) dan media sosial resmi (*instagram, facebook, tiktok, youtube*) sebagai media informasi dan publikasi kepada masyarakat.
7. Menjalin koordinasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum pada lokus terjadinya tindak pidana dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
8. Meningkatkan kegiatan patroli siber yaitu *profiling* dan *crawling* terhadap tautan-tautan yang diketahui menjual produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang melanggar hukum direkomendasikan untuk dilakukan take down.
9. Meningkatkan kesesuaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
10. Menyiapkan pendokumentasian secara memadai yang menunjukkan keterlibatan pimpinan Unit Kepala BPOM Ambon dalam proses pengelolaan dan implementasi manajemen risiko.
11. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.
12. Meningkatkan penyusunan kertas kerja pada masing – masing indikator dan kertas kerja perubahan target secara konsisten dan komprehensif sehingga alur penetapan / perubahan target dapat lebih tertelusur

13. Menyediakan data dukung dalam implementasi SAKIP baik dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas yang terintegrasi dengan baik.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI yang dilaksanakan setiap bulan secara konsisten.
2. Melakukan upload Data dukung monev renja Pembangunan ZI bulanan secara berkala sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan pengawasan kearsipan mencakup aspek penciptaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan termasuk sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan secara berkala terkait kesesuaian pengelolaan arsip pada Balai POM di Ambon.
4. Melakukan komunikasi aktif melalui WA grup BPOM di Ambon dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan.
5. Melaksanakan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens.
6. Optimalisasi eksternalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) dan media sosial resmi (*instagram, facebook, tiktok, youtube*) sebagai media informasi dan publikasi kepada masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum pada lokus terjadinya tindak pidana dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
8. Melaksanakan kegiatan patroli siber yaitu *profiling* dan *crawling* terhadap tautan-tautan yang diketahui menjual produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang melanggar hukum direkomendasikan untuk dilakukan take down.

9. Melaksanakan kesesuaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
10. Pemanfaatan layanan Bacarita do sebagai salah satu inovasi dalam pengumpulan dokumen secara terintegrasi sehingga memudahkan dalam pencarian dokumen.



LAMPIRAN

**BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN
DI AMBON**



BADAN POM

